

LAPORAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN,
KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA
TAHUN 2019



LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA TAHUN 2019

ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA
KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
SEKRETARIAT KABINET RI
2020

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petujuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet melakukan penyusunan dokumen Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Laporan ini memuat pelaksanaan program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang merefleksikan komitmen dan pertanggungjawaban pimpinan beserta seluruh staf atas keberhasilan dan kegagalan kinerja sepanjang tahun 2019 dalam mendukung capaian target kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2019.

Laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat, khususnya bagi unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat meningkat.

Jakarta, Januari 2020

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Edwin J.H Wuisang

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika pada tahun 2019 merefleksikan pertanggungjawaban kinerja sepanjang tahun 2019 dengan mengukur keberhasilan/kegagalan kinerja terhadap pencapaian satu target sasaran kegiatan dengan menggunakan instrumen tiga Indikator Kinerja.

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2019 untuk mencapai sasaran kegiatan "Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika" berhasil mencapai nilai rata-rata 99.65% (kategori "sangat baik" atau nilai A), yang diukur menggunakan tiga Indikator Kinerja sebagai berikut:

- a. **Indikator Kinerja (1):** Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mencapai nilai **100%** (kategori "sangat baik").
- b. Indikator Kinerja (2): Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mencapai nilai 98,32% (kategori "sangat baik").
- c. Indikator Kinerja (3): Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mencapai nilai 100% (kategori "sangat baik").

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tersebut selanjutnya diuraikan dalam rincian volume *output* tiga komponen kegiatan yang menghasilkan **290 rancangan rekomendasi** yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, terdiri dari:

- a. **Komponen (1**): Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika sebanyak **218 rancangan rekomendasi.**
- b. **Komponen (2)**: Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundangundangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika sebanyak **62 rancangan rekomendasi**.
- c. **Komponen (3)**: Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika sebanyak **10 rancangan rekomendasi.**

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika melaksanakan kegiatan-kegiatan sepanjang tahun 2019 untuk menghasilkan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam rangka mendukung penyelenggaraan program "Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyeenggarakan Pemerintahan".

Adapun realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2019 mencapai Rp 1.098.455.743,00 atau setara 99,85% dari total pagu anggaran atau Rp 1.100.000.000,00. Efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan sebesar Rp 1.544.257,00 diperoleh dari penghematan biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat koordinasi. Keberhasilan kinerja tahun 2019 ditunjang oleh komitmen pimpinan beserta seluruh staf dalam memenuhi target sasaran dan indikator kinerja sesuai standar pelayanan, serta dalam meningkatkan kelancaran dan pengembangan jejaring kerja dengan *stakeholders* di kementerian dan lembaga, secara berkelanjutan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan, peningkatan kinerja, serta penyusunan rencana anggaran dan kinerja tahun anggaran berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	٧
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	Vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. RENCANA STRATEGIS, VISI DAN MISI ORGANISASI	15
B. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. CAPAIAN KINERJA	26
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN	61
BAB IV PENUTUP	65
LAMPIRAN	67
Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja 2019	67
Lampiran 2 : Matriks Capaian Kinerja	69
Lampiran 3 : Matriks Penyerapan Anggaran	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Komposisi Sumber Daya Manusia	10
Tabel 2.1 : Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	19
Tabel 2.2 : Rencana Kerja Tahun 2019	20
Tabel 2.3 : Rincian Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2019	22
Tabel 2.4 : Perjanjian Kinerja Tahun 2019	23
Tabel 2.5 : Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Tahun 2019	24
Tabel 3.1 : Rentang Capaian Kinerja	27
Tabel 3.2 : Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019	28
Tabel 3.3 : Capaian Indikator Kinerja (1) Tahun 2019	29
Tabel 3.4 : Capaian Indikator Kinerja (2) Tahun 2019	42
Tabel 3.5 : Capaian Indikator Kinerja (3) Tahun 2019	50
Tabel 3.6 : Perbandingan Volume <i>Output</i> dan Capaian Kinerja 2018-2019	59
Tabel 3.7 : Perbandingan Realisasi Anggaran 2015-2019	62
Tabel 3.8 : Realisasi Anggaran Kegiatan dan Efisiensi Anggaran 2019	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Pertahanan,	
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	9
DAETAD CDAEIK	
DAFTAR GRAFIK	
	26
Grafik 3.1: Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2015 2019	20
Grafik 3.2 : Tren Volume Output Periode 2018-2019	59
Grafik 3.3 : Realisasi Anggaran Tahun 2015-2019	62

9.5	me or .	v = ×	1 x 1 x		

BAB I PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah jo. Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

LKj merupakan capaian target kinerja yang disusun melalui rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan atau dalam rangka penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menyusun dan menyampaikan dokumen LKj setelah tahun anggaran berakhir, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja, sebagaimana diperjanjikan kepada publik pada awal tahun 2019.

LKj berisi ringkasan tentang keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai diantaranya tujuan dan sasaran organisasi; pencapaian target kinerja organisasi; capaian kinerja; serta pembandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan dalam Rencana Strategi organisasi.

Laporan Kinerja Tahun 2019 disusun dengan cara membandingkan rencana target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019 dengan realisasi target kinerja pada akhir tahun 2019. Pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja atas pencapaian satu target sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Kemunikasi, dan Informatika dilakukan dengan menggunakan instrumen

tiga Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mengacu pada dokumen Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2019.

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet Pasal 59-60, mengatur ruang lingkup tugas pokok Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika, yaitu membantu Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam hal:

- penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
- penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- 3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
- 4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan;
- 5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- 6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Pelaksanaan tugas pokok tersebut lebih lanjut diimplementasikan dalam fungsifungsi yang terdiri dari:

- perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- 2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- 3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- 4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan

- perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dar informatika:
- 5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden:
- 6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- 7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Keasdepan Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dibagi menjadi 3 Bidang yaitu **Bidang Pertahanan dan Keamanan, Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan, dan Bidang Komunikasi dan Informatika**. Masing-masing Bidang dibagi dalam dua Sub Bidang. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, tugas masing-masing Bidang dan Sub Bidang tersebut, adalah sebagai berikut:

A. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Bidang Pertahanan dan Keamanan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam Pertahanan dan Keamanan melaksanakan tersebut, Bidang tugas menyelenggarakan fungsi:

- perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan;
- penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan;
- 3) pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan;
- 4) pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan dan keamanan;
- 5) penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pertahanan dan keamanan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- 6) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan dan keamanan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pertahanan dan Keamanan terbagi menjadi 2 Subbidang, yaitu:

1) Subbidang Pertahanan

Subbidang Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pertahanan.

2) Subbidang Keamanan

Subbidang Keamanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang keamanan.

B. Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan

Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pendapat atau pandangan dalam rangka pemerintah, penyiapan penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan menyelenggarakan fungsi:

- perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan;
- 2) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan;
- 3) pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan:

- 4) pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundangundangan di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan;
- 5) penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- 6) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kesatuan bangsa dan wilayah perbatasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pertahanan dan Keamanan terbagi menjadi 2 Subbidang, yaitu:

1) Subbidang Kesatuan Bangsa

Subbidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang kesatuan bangsa.

2) Subbidang Wilayah Perbatasan

Subbidang Wilayah Perbatasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis

dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang wilayah perbatasan.

C. Bidang Komunikasi dan Informatika

Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang komunikasi dan informatika. Dalam Komunikasi dan Informatika tersebut. Bidana melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang komunikasi dan informatika;
- 2) penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang komunikasi dan informatika;
- pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang komunikasi dan informatika;
- 5) penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang komunikasi dan informatika, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- 6) pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang komunikasi dan informatika.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Komunikasi dan Informatika terbagi menjadi 2 Subbidang, yaitu:

1) Subbidang Pelayanan Informasi Publik

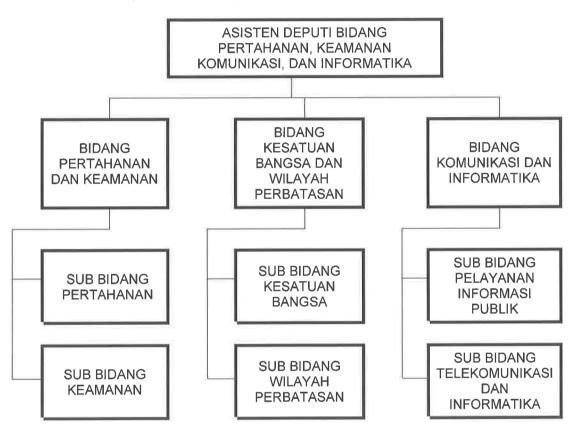
Publik mempunyai tugas Subbidang Pelayanan Informasi melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pelayanan informasi publik.

2) Subbidang Telekomunikasi dan Informatika

Subbidang Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang telekomunikasi dan informatika.

Berdasarkan uraian di atas, apabila digambarkan dalam bagan, struktur organisasi Keasdepan Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika



(Sumber: diolah dari Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 dan data kepegawaian Sekretariat Kabinet 2018)

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari didukung kekuatan sumber daya manusia sebanyak 13 orang dengan komposisi terdiri dari: 10 pejabat struktural, 2 analis kebijakan dan 1 pegawai tidak tetap sebagai staf administrasi. Komposisi sumber daya manusia Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang tercatat per-31 Desember 2019 disajikan dalam tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1

Komposisi Sumber Daya Manusia
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Pan	gkat	Jabatan		Pendidikan Jenis Kela		lamin					
Cal	Irralla	Name Jahatan	Jmlh		Ti	ngkat		10.	Je	nis	Jmlh
Gol.	Jmlh	Nama Jabatan	Jmin	S2	S1	D3	SLTA	Jmlh	Р	L	JIIIII
IV/c	1	Asisten Deputi	1	1	-	-	-	1	-	1	1
IV/b	2	Kepala Bidang	3	2	1	¥	-	3	2	1	3
III/d	1			3	-	- 2	-	3	1	2	3
III/d	3	Kepala	6	1	-	2	-	1	1	4	1
III/c	3	Subbidang		-	2		-	2	-	2	2
III/a	2	Analis	2	-	2	Ē	-	2	2	-	2
Jmlh	12		12	7	5	-	-	12	6	6	12

(Sumber: diolah dari data kepegawaian Sekretariat Kabinet tahun 2019)

B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Aspek strategis merupakan hal-hal bersifat strategis yang dapat memberikan dampak besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sebagai unit kerja yang bertugas membantu Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk memberikan dukungan pengelolaan kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat strategis dalam memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dapat dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*), terutama kebijakan dan program di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden. Presiden, sebagai Kepala Pemerintahan, membutuhkan dukungan unit kerja yang dapat mengelola, mengendalikan dan memastikan upaya penyelesaian atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berperan aktif dalam proses pengelolaan kabinet ini, mulai dari tahap formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memiliki posisi netral dan bebas dari kepentingan apapun sehingga mampu memberikan pandangan atau pemikiran secara berimbang yang tidak berpihak kepada sektor, atau Kementerian/Lembaga manapun.

Meskipun memiliki kedudukan yang strategis, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika di saat yang sama juga menghadapi permasalahan yang berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan kabinet, khususnya terkait upaya pemberian rekomendasi kebijakan dalam perumusan program dan kebijakan pemerintah. Sejalan dengan dinamika bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika dan situasi dalam negeri yang berubah dengan cepat, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika seringkali dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan segera dari Presiden, baik melalui sidang kabinet atau rapat terbatas maupun di luar forum tersebut yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika perlu

mengantisipasi dan menyiapkan bahan dan rekomendasi/alternatif kebijakan yang berkualitas dan komprehensif dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya.

Sebagai unit kerja organisasi Sekretariat Kabinet yang berfungsi menyiapkan analisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang berkualitas untuk disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memiliki aspek-aspek strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor pendukung bagi pencapaian tujuan organisasi, namun dapat juga berpotensi menjadi faktor penghambat apabila tidak dikelola dengan efektif, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Aspek-aspek strategis tersebut harus dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari, antara lain:

- 1. INTERNAL. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memiliki hal-hal berikut: (a) kekuatan organisasi, dalam bentuk komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi, kebijakan organisasi dan sumber daya manusia yang berkualitas; (b) kelemahan organisasi, yaitu peningkatan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal; (c) potensi organisasi, yang terdiri dari komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, dan komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja.
- 2. **EKSTERNAL**. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memiliki faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan dan sasaran, yakni politik, ekonomi, sosial, serta teknologi yang mempengaruhi perkembangan isu di bidang pertahanan, komunikasi, dan informatika. Adapun hal-hal yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Asisten Deputri Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan

Informatika adalah: (a) peluang organisasi, yang terdiri dari penyempurnaan, perbaikan, penyederhanaan sistem manajemen, prosedur dan kebijakan, atau perundang-undangan (deregulasi dan debirokratisasi) dalam ketentuan penyelenggaraan pelayanan publik, pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan egovernment di setiap instansi pemerintah, dan dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (good governance) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan, serta (b) ancaman organisasi, yang terdiri dari tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi pemerintah, overlapping tugas dan fungsi/irisan pekerjaan di seluruh kedeputian substansi di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun lembaga kepresidenan, serta koordinasi dan kerja sama yang kurang optimal baik dengan unit kerja di Sekretariat Kabinet. Kantor Kepresidenan, maupun lingkungan Kementerian/Lembaga.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memiliki identifikasi permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika meliputi beberapa aspek seperti:

- Aspek Ketatalaksanaan. Koordinasi dan kerja sama masih kurang optimal baik antara kementerian/lembaga di pusat dan daerah, antara unit kerja di lingkungan lembaga kepresidenan, maupun antara unit kerja di lingkungan internal Sekretariat Kabinet, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi KeAsisten Deputian Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam menghasilkan rekomendasi yang berkualitas.
- 2. **Aspek Sumber Daya Manusia**. Kompetensi dan keterampilan SDM perlu terus dikembangkan untuk mendukung tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika.
- 3. Aspek Sarana dan Prasarana. Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya dan belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang dikembangkan di lingkungan Sekretariat Kabinet. Selain itu dukungan prasarana teknologi juga belum sesuai dengan kebutuhan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memandang perlu langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan dimaksud guna peningkatan kinerja, antara lain:

- Peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Biro SDM, Organisasi dan Tata Laksana maupun yang ditawarkan oleh lembaga lain baik dalam maupun luar negeri, yang relevan dengan kebutuhan organisasi.
- Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan seluruh kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, dan lembaga swadaya masyarakat, dengan mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- 3. Memanfaatkan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah ada dan/atau akan dibangun, serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kualitas sistem informasi dalam penyelenggaraan egovernment.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS, VISI DAN MISI ORGANISASI

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dalam kaitan ini, perencanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika disusun dengan mengacu pada Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan Rencana Strategis Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2015-2019. Dalam rangka mendukung visi dan misi Sekretariat Kabinet, serta pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika menetapkan visi yang akan diwujudkan sebagai berikut:

"Menjadi Asisten Kedeputian yang profesional dan andal dalam mendukung
Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menyelenggarakan manajemen
kabinet di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika".

Visi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet serta dinamika lingkungan strategis. Perumusan visi tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai keadaan yang diharapkan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika ke depan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Asisten Kedeputian Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika diarahkan menjadi unit eselon II yang strategis, profesional, dan dapat diandalkan dalam memberikan dukungan kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk melaksanakan

tugas sehari-hari dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet, serta diharapkan mampu mengantisipasi berbagai tantangan di masa depan sekaligus meningkatkan kualitas kinerja secara maksimal.

Dalam mewujudkan visi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika ditetapkan <u>misi</u> sebagai berikut:

"Memberikan dukungan manajemen kabinet di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan

Keamanan dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan

yang baik (good governance)"

Misi tersebut dimaksudkan agar pengelolaan kabinet di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dapat terlaksana dengan baik, mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika diharapkan melaksanakan fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), koordinasi (*coordinating*), pengendalian (*directing*) termasuk di dalamnya unsur pengawasan (*controlling*) kebijakan dan program pemerintah, serta terlibat aktif dalam keseluruhan siklus manajemen kebijakan, dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan. Unsur pengawasan memegang peran penting dalam keberhasilan kebijakan/program pemerintah.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika merumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan. Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan visi dan misi yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu hingga lima tahun ke depan dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika menetapkan <u>tujuan</u> sebagai berikut:

"Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas kepada Deputi di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika"

Pencapaian tujuan dilakukan dengan meningkatkan hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, yang secara khusus akan dipantau melalui pengukuran indikator sejauh mana rekomendasi kebijakan yang disampaikan berkualitas sehingga disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka mendukung pengelolaan manajemen kabinet. Tujuan merupakan *outcome* yang ingin dicapai dalam jangka waktu menengah yaitu antara tiga hingga lima tahun untuk mencapai visi. Mengingat jangka waktu pencapaian tujuan lebih dari satu tahun, maka tujuan tersebut dijabarkan dalam capaian yang jangka waktunya lebih pendek lagi, yaitu capaian per tahun atau disebut dengan sasaran.

Sasaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2015-2019 menggambarkan beberapa hal yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek yaitu setiap tahun, selama lima tahun ke depan dengan rumusan yang terukur dan spesifik, dengan pencapaian dilakukan secara gradual dengan mempertimbangkan berbagai aspek, khususnya ketersediaan anggaran. Memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika menetapkan <u>sasaran strategis</u> yang hendak dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu:

"Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika" Terwujudnya hasil rekomendasi kebijakan yang berkualitas diukur dengan peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika untuk disampaikan kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Semakin berkualitas rancangan rekomendasi tersebut, maka akan semakin dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan manajemen kabinet. Makin tinggi persentase rekomendasi dimanfaatkan oleh Sekretaris Kabinet menjadi indikator rekomendasi tersebut makin berkualitas. Secara lebih rinci, tujuan, sasaran dan indikator kinerja digambarkan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Memberikan dukungan pemikiran yang berkualitas kepada Deputi di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Peningkatan kualitas hasil rekomendasi kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
internation		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
		3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun tersebut diuraikan lebih lanjut dalam sasaran kegiatan tahunan. Pada tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika merencanakan pencapaian sasaran kegiatan yaitu "Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika". Jenis keluaran yang dihasilkan (output) sasaran kegiatan dimaksud berupa "Rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika" yang berorientasi untuk mendukung pencapaian outcome program, yaitu "Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan".

B. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Melalui dokumen Renja diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, program dan kegiatan yang diprioritaskan pencapaian prioritas pembangunan nasional pada tahun tertentu, serta kebutuhan pendanaannya. Dengan demikian, Renja dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara penganggaran dan target kinerja yang diharapkan, dengan menggunakan indikator-indikator untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Renja tahun 2019 disusun dan disahkan sebelum tahun berjalan (2018) dengan indikator-indikator kinerja mengacu pada dokumen perjanjian kinerja tahun sebelumnya. Sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja dan anggaran yang ditetapkan untuk pelaksanaan program/kegiatan Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika pada tahun 2019 dapat disajikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2 Rencana Kerja Tahun 2019 Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Sasaran Kegiatan	Komponen Kegiatan	indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Output	Target Sasaran (%)	Anggaran (Rp)
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	142 rancangan rekomendas i	100	1.026.988.000
	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan	9 rancangan rekomendasi	100	46.948.000

di bid pertal keam komu	dang-undangan	peraturan perundang- undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.			
ranci rekol sidar rapa perte dipin dihac Pres Wak bidal kean	rusunan angan mendasi materi ng kabinet, t, atau emuan yang npin dan/atau diri oleh iden dan/atau il Presiden di ng pertahanan, nanan, unikasi, dan matika.	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	9 rancangan rekomendasi	100	26.064.000
		TOTAL	160		1.100.000.000

Sumber: dokumen Rencana Kerja Pagu Alokasi Anggaran Bagian Anggaran 114 (Sekretariat Kabinet) Tahun 2019

Rencana Kerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2019 didukung alokasi anggaran Rp 1.100.000 untuk mendukung pencapaian target keluaran *(output)* yang mencakup tiga komponen yaitu:

- 1. Komponen (1) "Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika". Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain: menghadiri/menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi/seminar/FGD penyusunan rekomendasi, melaksanakan pemantauan/pengamatan ke lapangan terhadap isuisu pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.
- 2. Komponen (2) "Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundangundangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika". Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain: mengikuti rapat-rapat koordinasi/panitia antarkementerian dan kelompok kerja penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan pengesahan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

3. Komponen (3) "Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika". Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain: menyusun materi substansi untuk bahan sidang kabinet/rapat terbatas tentang isu-isu pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika dan kunjungan kenegaraan/pertemuan internasional yang dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di dalam dan luar negeri.

Sebagai catatan, pada pertengahan tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika melakukan revisi anggaran untuk melaksanakan kebijakan yang baru diputuskan di lingkungan Sekretariat Kabinet, yaitu optimalisasi anggaran kegiatan untuk kebutuhan peningkatan tunjangan kinerja pegawai Sekretariat Kabinet. Sehubungan dengan hal tersebut, maka postur anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2019 mengalami perubahan dari dokumen Renja 2019, dengan perincian yang dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3

Rincian Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2019
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Kegiatan: Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

No	Komponen Keglatan		Alokasi 2019		Pagu Revisi
1.	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Rp	1.026.988.000	Rp	1.062.567.000
2.	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Rp	46.948.000	Rp	37.433.000

No	Komponen Keglatan		Alokasi 2019		Pagu Revisi
3.	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Rp	26.064.000	Rp	*
	TOTAL	Rp	1.100.000.000	Rp	1.100.000.000

Setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan, pada bulan Januari 2019, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika menyusun Perjanjian Kinerja (PK) sebagai pernyataan komitmen pejabat eselon II (Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika) kepada pejabat eselon I (Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan) untuk mewujudkan target kinerja tertentu disertai indikator kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas dan fungsi serta sumber daya yang tersedia dalam kurun waktu satu tahun. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika menetapkan sasaran kegiatan tahun 2019 yang diperjanjikan yaitu "Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang berkualitas di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika", yang diukur dengan tiga indikator kinerja dan target capaian berupa manfaat (outcome) sebagaimana digambarkan dalam tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	100%
	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang bidang	100%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	
	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	100%

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretariat Kabinet Tahun 2019

Indikator-indikator kinerja pada dokumen PK digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dalam menyiapkan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika. Rumusan "rancangan rekomendasi...yang disetujui..." pada ketiga indikator kinerja di atas memiliki arti bahwa Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan memberikan respon berupa persetujuan atas rancangan rekomendasi kebijakan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika. Selanjutnya, rancangan rekomendasi yang memperoleh persetujuan tersebut akan diajukan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan kepada Sekretaris Kabinet dalam rangka mendukung pencapaian outcome program dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengukuran indikator kinerja menggunakan formulasi perhitungan sebagai berikut.

Tabel 2.5

Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Tahun 2019
Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	
1,	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi	Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	x 100%

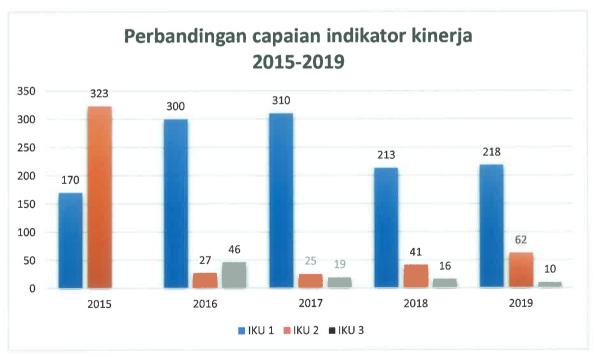
No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	
	Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang <u>disampaikan</u> kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	
2.	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika <u>yang disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	x 100%
		Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan perundang- undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang <u>disampaikan</u> kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	
3.	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	Jumlah rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	x 100%
		Jumlah rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	

Sumber: Lampiran Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Kabinet, Lampiran II hlm.13-16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja merupakan aktivitas membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Pengukuran capaian kinerja Asisten Deputi Bidang ouPertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan pengelolaan kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, dengan menggunakan formulasi perhitungan IKU sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.



Grafik 3.1 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 2015-2019

Grafik 3.1 menunjukan perbandingan capaian Indikator Kinerja pada Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2014-2015. Grafik tersebut menunjukan trend stabilitas pada capaian masing-masing IKU, walaupun secara umum terjadi penurunan pada tahun 2017 ke tahun 2018. Adapun pada tahun 2015, tidak terdapat data terkait capaian masing-masing IKU.

Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam LKj 2019 ini berbasis pada penilaian sendiri (*self assessment*), dengan hasil rata-rata persentase capaiannya mengacu pada rentang capaian kinerja sehingga diperoleh kategori capaian kinerja dan nilai capaian kinerja. Rentang capaian kinerja yang digunakan akan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019 sebagaimana tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1
Rentang Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori	Nilai
1.	85% - 100%	Sangat Baik	Α
2.	70% - <85%	Baik	В
3.	55% - <70%	Sedang	С
4.	<55%	Kurang Baik	D

Pencapaian sasaran dengan terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan output kegiatan berupa rancangan rekomendasi untuk disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berhasil melaksanakan tugas dan fungsi menyiapkan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan di lingkungan kerja Sekretariat Kabinet. Pemilahan dan analisis dilakukan terhadap input 1.191 dokumen/surat selama periode Januari-Desember 2019, yang berasal dari kementerian/lembaga di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika. Output yang dihasilkan adalah 290 rancangan rekomendasi yang terdiri dari: 218 dan penyelenggaraan rekomendasi kebijakan terkait rencana rancangan pemerintahan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam; 62 rancangan rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam; dan 10 rancangan rekomendasi kebijakan terkait materi

sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam.

Jumlah *output* 290 rancangan rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tersebut memperoleh respon berupa persetujuan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, berdasarkan formulasi perhitungan, maka capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2019 mencapai 99.65% (kategori "sangat baik" atau mencapai nilai A), sebagaimana data pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Output	Target	Capaian Kinerja
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan,	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	218 rancangan	100%	100 %
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	62 rancangan	100%	98,38%
	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	10 rancangan	100%	100%

Indikator Kinerja (1)

"Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan"

Capaian Indikator Kinerja (1) diukur menggunakan formulasi perhitungan yaitu membandingkan jumlah rancangan rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan jumlah rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sepanjang tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika rekomendasi atas menghasilkan output 218 rancangan rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Seluruh rancangan rekomendasi tersebut memperoleh persetujuan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Kabinet. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka capaian Indikator Kinerja (1) sebesar 100%, yang dapat digambarkan dalam tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja (1) Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi		% Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
		Output	Outcome	[(4):(3)]	[(5):(2)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase rancangan	100%	218	218	100%	100%
rekomendasi atas					
rencana dan					
penyelenggaraan					
pemerintahan di bidang					
pertahanan,					
komunikasi, dan					
informatika yang					
disetujui oleh Deputi					
Bidang Politik, Hukum					
dan Keamanan					

Sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan *output* rancangan rekomendasi untuk Indikator Kinerja (1) terdiri dari: 12 orang SDM, dokumen Standar Pelayanan, alokasi anggaran Rp 1.062.567.000, serta surat-surat masuk yang berasal dari kementerian/lembaga dalam lingkup pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika. Dalam penyusunan rancangan rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika melakukan kegiatan pendalaman substansi yang bersumber pada: (i) referensi dokumen tertulis (laporan, buku, jurnal, media); (ii) koordinasi dengan K/L terkait baik berupa rapat maupun korespondensi; (iii) pemantauan/kunjungan kerja lapangan dan partisipasi pada konferensi/seminar/perundingan/FGD baik dilaksanakan di dalam maupun luar negeri, yang sebagian capaian dan data dukungnya kami uraikan berikut ini.

1. Permohonan Izin Pembangunan Gedung Kantor di 12 Satuan Kerja Badan Pusat Statistik T.A 2019

BPS mengusulkan pembangunan gedung kantor di 14 Satker kepada Presiden, dan telah disetujui melalui surat Seskab Nomor: B.268/Seskab/Polhukam/06/2018 tanggal 8 Juni 2018. Sehubungan dengan hal permintaan tersebut, Presiden RI telah memberikan arahan untuk melakukan moratorium tetapi tetap memperbolehkan pembangunan gedung yang sifatnya urgent, dan harus mendapatkan persetujuan Presiden.

Sekretariat Kabinet pada tanggal 12 Februari 2019 telah memfasilitasi pertemuan antara BPS dengan Kementerian PU dan PR, Kemenkeu, dan BPKP guna pembahasannya, disepakati bahwa permohonan dimaksud dapat direkomendasikan untuk disetujui. Atas persetujuan tersebut BPS telah mampu menyelesaikan 13 dari 14 usulan yang diusulkan tersebut. Sebagai bagian dari pengajuan izin pembangunan yang telah disetujui sebelumnya, Sekretariat Kabinet menyetujui izin permohonan pembangunan gedung dimaksud dengan beberapa pertimbangan melalui surat Sekretaris Kabinet (terlampir).



2. Keanggotaan Panitia antar Kementerian terkait Organisasi Perundingan Perbatasan

Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyampaikan surat kepada Sekretaris Kabinet untuk mengirimkan nama sebagai Keanggotaan Panitia antar Kementerian terkait Organisasi Perundingan Perbatasan perihal. Selama ini pelaksanaan perundingan perbatasan negara belum memiliki payung hukum yang sesuai dengan amanat UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Oleh karena itu, pembentukan peraturan terkait organisasi perundingan dimaksud perlu segera dilaksanakan.

Adapun aspek-aspek yang perlu menjadi perhatian dalam pembentukan peraturan terkait organisasi perundingan perjanjian internasional antara lain aspek kelembagaan, aspek kebijakan, aspek prosedural (SOP), dan aspek dukungan dana perundingan, melalui surat Sekretaris Kabinet (terlampir).



3. Laporan Hasil Reviu BPKP atas Pelaksanaan Keppres No. 25 Tahun 2017 dan Keppres No. 16 Tahun 2018

Reviu BPKP adalah tindak lanjut surat Seskab kepada Ka. BPKP yang meminta audit kinerja Kemhan dan Mabes TNI dalam melaksanakan Keppres No. 25 Tahun 2017 (misi MINUSCA) serta Keppres No. 16 Tahun 2018 (pengalihan tujuan misi, anggaran, dan peralatan dari misi MINUSCA ke MONUSCO) akibat perubahan kebijakan PBB.

Mengingat temuan BPKP bersifat signifikan (khususnya penyelesaian kontrak, pengenaan denda pada rekanan, klarifikasi penggunaan sisa dana operasi Satgas Yonsit TNI MINUSCA pada PMPP Sentul, serta penyetoran beberapa kewajiban ke kas Negara) maka Sekretaris Kabinet menyampaikan reviu BPKP kepada Menhan dan Panglima TNI dengan tembusan Menlu (ketua TKMPP) dan Menkeu (anggota TKMPP). Adapun surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.147/Seskab/Polhukam/04/2019 tanggal 16 April 2019 (terlampir).



Tindak Lanjut Arahan Presiden tentang Percepatan Realignment Flight Information Region

Presiden pada Ratas tanggal 8 September 2015 memberi arahan agar dalam jangka waktu 3 sampai dengan 4 tahun disiapkan sumber daya manusia dan peralatan yang diperlukan untuk mengelola Flight Information Region (FIR) di seluruh territorial Indonesia dengan lebih baik. Hal tersebut telah ditindaklanjuti Seskab kepada kementerian/lembaga (K/L) terkait, serta rapat koordinasi pada tanggal 18 Juli dan 8 September 2017, yang hasilnya Kemhub cq. AirNav Indonesia telah siap dan menargetkan Indonesia dapat melakukan pengelolaan FIR di bawah 20.000 kaki mulai Januari 2018, sedangkan untuk di atas 20.000 kaki (pengelolaan penuh) akan disegerakan pula sambil menyiapkan SDM dan infrastruktur serta peralatan yang diperlukan. Berkenaan dengan hal tersebut, Sekretaris Kabinet perlu meminta kembali agar Menko Maritim melaporkan perkembangan pelaksanaan realignment FIR kepada Presiden melalui Surat Sekretaris Kabinet (terlampir).



Jakarta, 6 April 2019

Nomor Sifat Lampiran Hal

B 0\49/Seskab/Polhukam/4/2019 Segera 1 Berkas

1 Bernau
Perkembangan Tindak Langus
Arahan Presiden mengenai
Paraelolaan Flight Information

Kepada Yth Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di Jakarta

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Presiden pada Ratas tanggal 8 September 2015 memberi arahan agar dalam jangka waktu tiga sampai dengan empat tahun dialapkan sumber daya manusia dan peralatan yang diperlukan untuk mengelola Flight Information Region (FIR) di seturuh teritorial indonesia dengan lebih baik,

Menindaklanjuti surat kami sebelumnya nomor: B.176/Seskab /Polhukam/4/2018 tanggal 23 April 2018, serta mengingat batas waktu pelaksanaan arahan Presiden jatuh pada tahun 2019, bersama ini kami minta agar Menko dapat melaporkan perkembangan tindak lanjut arahan Presiden dimaksud:

Atas perhatian dan kerja sama Menko, kami mengucapkan terima kasih,

Sekretaris Kabinet, Premono Anung

- Presiden, sebagai laporan;
 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
- Menteri Perhubungan;
 Menteri Luar Negeri;
- Menteri Pertahanan

5 Menteri Pertai 6. Panglima TNI

Jalan Veteran No. 17, Jakarta 10110

5. Tanggapan atas Permohonan Izin Pembangunan Gedung Kantor TVRI Stasiun Bangka Belitung

Sehubungan dengan surat Direktur Utama LPP TVRI kepada Presiden nomor: 604/I.1/TVRI/219 tanggal 29 Mei 2019 perihal permohonan izin pembangunan Gedung Kantor TVRI Stasiun Bangka Belitung, dan merujuk hasil rapat pembahasan Sekretariat Kabinet, diketahui pembangunan dimaksud belum bisa dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa usulan.

Selain itu LPP TVRI belum memiliki alokasi anggaran untuk melakukan pembangunan Gedung Kantor TVRI Stasiun Bangka Belitung pada tahun anggaran 2019 dan belum ada pernyataan aset idle dari Kementerian Keuangan di lokasi tersebut yang dapat dimanfaatkan oleh TVRI Stasiun Bangka Belitung sebagai gedung kantor. Surat tersebut telah disampaikan melalui surat Sekretaris Kabinet (terlampir).



Jakarta, 66 Juni 2019

: B₀227/Seskab/Polhukam/06/2019 Nomor

Sifat

: Biasa

Lampiran : -: Tanggapan atas Permohonan Izin Pembangunan Gedung Kantor TVRI Stasiun Bangka Perihal

Belitung

Kepada Yth :

Direktur Utama LPP TVRI

Jakarta

Sehubungan dengan surat Direktur Utama LPP TVRI kepada Presiden nomor: 604/I.1/TVRI/219 tanggal 29 Mei 2019 perihal permohonan izin pembangunan Gedung Kantor TVRI Stasiun Bangka Belitung, dan merujuk hasil rapat pembahasannya pada tanggal 18 Juni 2019 di Sekretariat Kabinet, bersama ini perlu kami sampalkan bahwa permohonan Saudara belum dapat diproses lebih lanjut kepada Presiden karena belum memenuhi syarat yang ditentukan, antara lain:

- a. Rencana pembangunan Gedung Kantor TVRI Stasiun Bangka Belitung belum pernah diusutkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Kernenterian Keuangan;
- b. LPP TVRI belum memiliki alokasi anggaran untuk melakukan pembangunan Gedung Kantor TVRI Staslun Bangka Belitung pada tahun anggaran 2019;
- Belum ada pernyataan aset idle dari Kementerian Keuangan di lokasi tersebut yang dapat dimanfaatkan oleh TVRI Stasiun Bangka Belitung sebagai gedung kantor;
- Rencana pembangunan Gedung tersebut juga belum dilakukan perhitungan kebutuhan biaya pembangunan bangunan negara oleh Kementerian Pekerjaan Urnum dan Perumahan Rakyat.

mohon Saudara dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian/Lembaga terkait sebelum diajukan kembali kepada Presiden.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabibet

Pramorio Anuna Ca

Menteri Keuangan;

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

6. Tanggapan atas Permohonan Izin Renovasi Gedung Pusat Data dan Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sehubungan dengan surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakvat nomor: CK.04.02-Mn/1206 tanggal 19 Juni 2019 kepada Presiden hal Permohonan Izin Renovasi Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan merujuk hasil rapat pembahasannya pada tanggal 15 Juli 2019 di Sekretariat Kabinet, permohonan Menteri PUPR belum dapat diproses lebih lanjut karena belum memenuhi syarat yang ditentukan, diantaranya rencana renovasi (pembangunan) gedung belum diusulkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) kepada Kementerian Keuangan, hingga belum ada pernyataan dari Kementerian Keuangan mengenai aset idle yang dapat dimanfaatkan sebagai gedung kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Surat dimaksud disampaikan melalui Surat Sekretaris Kabinet (terlampir).



Jakarta, 12 Juli 2019

Nomor : B.0241 /Seskab/Polhukam/07/2019

: Segera Lampiran: 1 (satu) iembar

Perihal : Tanggapan etas Permohonan Izin Renovaal Gedung Pusat Data dan Informasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kepada Yth.: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

di Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor: CK.04,02-Mn/1206 tanggal 19 Juni 2019 kepada Presiden hal Permohonan Izin Renovasi Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan merujuk hasil rapat pembahasannya pada tanggal 15 Juli 2019 di Sekretariat Kabinet, bersama ini kami sampaikan bahwa permohonan Menteri belum dapat diproses lebih lanjut kepada Presiden karena belum memenuhi syarat yang ditentukan, antara lain:

- a. rencana renovasi (pembangunan) gedung belum diusulkan dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) kepada Kementerian Keuangan;
- b. Kemenlerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum memiliki alokasi anggaran untuk melakukan renovasi (pembangunan) gedung tersebut pada tahun anggaran 2019;
- c. belum ada pernyataan dari Kementerian Keuangan mengenai aset idle yang dapat dimanfaatkan sebagai gedung kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- d. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum mengalihkan status penggunaan Barang Milik Negara (gedung kantor) di Jl. Raden Patah t kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Berkenaan dengan itu, kiranya Menteri dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait sebelum diajukan kembali kepada Presiden

Demikian, untuk menjadi maklum

Sekretaris Kabinet,

Framono Anung

Tembusan Yth

Tembusan Yin:

Presiden, sebagai laporan;

Menteri Keuangan; dan

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Jalan Veteran No. 18, Jakarta 10110

7. Percepatan Tindak Lanjut Arahan Presiden tentang Sinkronisasi Penataan Gelar Kekuatan TNI dengan Pembangunan Nasional

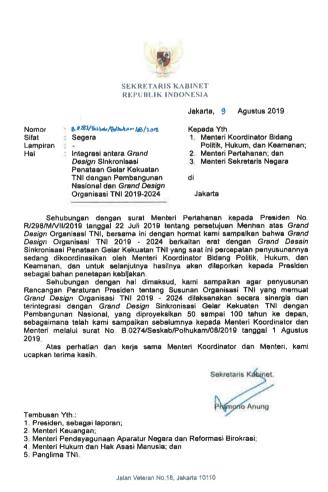
Dalam rangka mempercepat penyelesaian penyusunan *Grand Design* SPGK-TNI, Sekretariat Kabinet telah menyelenggarakan rapat koordinasi setingkat eselon I bersama seluruh kementerian/lembaga terkait pada tanggal 17 Juli 2019, dengan keputusan Kemenko Polhukam selaku *leading sector* segera mengoordinasikan seluruh K/L terkait untuk mempercepat penyelesaian *Grand Design* SPGK-TNI terintegrasi dengan *Grand Design* Organisasi TNI diproyeksikan 50 sampai 100 tahun ke depan; *Grand Design* SPGK-TNI mengadopsi seluruh arahan Presiden, dilengkapi skema pembiayaan seperti melalui *ruislag*, berikut strategi mencapai besarannya; Perlu dibentuk tim guna mempercepat penyelesaian permasalahan secara intensif serta menginventarisir aset TNI sebagai bahan kebijakan Presiden menetapkan *ruislag*; dan *Grand Design* SPGK-TNI ditargetkan selesai sebelum Desember 2019, untuk dilaporkan Menko Polhukam kepada Presiden, melalui surat Sekretaris Kabinet (terlampir).



8. Integrasi antara Grand Design Sinkronisasi Penataan Gelar Kekuatan TNI dengan Pembangunan Nasional dan Grand Design Organisasi TNI 2019-2024

Sekretaris Kabinet menyampaikan *Grand Design* Organisasi TNI 2019 - 2024 berkaitan erat dengan *Grand Desain* Sinkronisasi Penataan Gelar Kekuatan TNI yang saat ini percepatan penyusunannya sedang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan untuk selanjutnya hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden sebagai bahan penetapan kebijakan.

Sehubungan dengan hal dimaksud, Sekretaris Kabinet menyampaikan agar penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi TNI yang memuat *Grand Design* Organisasi TNI 2019 - 2024 dilaksanakan secara sinergis dan terintegrasi dengan *Grand Design* Sinkronisasi Gelar Kekuatan TNI dengan Pembangunan Nasional (terlampir).



9. Tanggapan atas Permohonan Izin Prinsip Pembangunan Gedung Penunjang Siaran

Sehubungan dengan surat Direktur Utama LPP RRI kepada Presiden nomor: 1198/D.U/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal Permohonan Izin Prinsip Pembangunan Gedung Penunjang Siaran, Sekretaris Kabinet bersurat kepada Direktur Utama LPP RRI bahwa permohonan pembangunan tersebut belum dapat diproses lebih lanjut kepada Presiden karena belum memenuhi syarat yang ditentukan, antara lain sinkronisasi perhitungan kebutuhan luas gedung antara yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selain itu mengingat bangunan gedung yang akan dibangun lebih dari 8 (delapan) lantai, maka perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun Surat Sekretaris Kabinet (terlampir).



Agustus 2019 Jakarta.

Nomor : B. 0304 /Seskab/Polhukam/08/2019

Slfat : Biasa Lampiran: 1 (satu) surat

Perihal : Tanggapan atas Permohonan Izin Prinelp Pembangunan Gedung Penunjang Slaran

Kepada Yth.:

Direktur Utama LPP RRI

di

Jakarta

Sehubungan dengan surat Direktur Utama LPP RRI nomor: 1198/D.U/08/2019 tanggal 5 Agustus 2019 kepada Presiden perihal Permohonan Izin Prinsip Pembangunan Gedung Penurjang Siaran, bersama ini perlu kami sampaikan bahwa permohonan Saudara belum dapat diproses lebih lanjut kepada Presiden karena belum memenuhi syarat yang ditentukan, antara lain:

- a. anggaran pembangunan gedung belum disahkan dalam DIPA T.A. 2020 atau paling tidak sudah ada penetapan alokasi anggaran (pagu definitif) T.A. 2020;
- b. masih memerlukan sinkronisasi perhitungan kebutuhan luas gedung, yakni antara hasil perhitungan yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dengan hasil perhitungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Penumahan Rakyat;
- c. mengingat bangunan gedung yang akan dibangun lebih dari 8 (delapan) lantai, perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- d. memperhatikan rencana iokasi pembangunan gedung berada di Kawasan Medan Merdeka, perlu berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerlan Sekretariat Negara dan instansi terkait yang diperlukan.

Berkenaan dengan itu, Saudara dapat berkoordinasi lebih lanjut dengan kementerian/lembaga terkait sebelum diajukan kembali kepada Presiden,

Demikian, untuk menjadi maklum.

Sekretaris Kabinet, Planeno Anung

- Tembusan Yth.:

 1. Presiden, sebagai laporan;

 2. Menleri Keuangan;

 3. Menleri Pekerjaan Umurn dan Perumahan Rakyat;

 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Jalan Veteran No. 17, Jakaria 10110

10. Pengamanan Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) nomor: R.677/KA.BSSN/PP.01.03/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019 hal Laporan Perkembangan Hasil Mitigasi Pasca Insiden Padam Listrik 4 Agustus 2019 yang peningkatan pengamanan merekomendasikan salah satunva perlunya Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional (IIKN) dan hasil pembahasan bersama antara Sekretariat Kabinet, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan BSSN dalam pertemuan tanggal 3 September 2019 di kantor Sekretariat Kabinet serta dengan memperhatikan hasil dari ASEAN Ministerial Conference on Cybersecuriy 2019 di Kabinet bersurat kepada Kepala Sekretaris Singapura. menyempaikan bahwa pengaturan mengenai pengamanan IIKN seyogianya diatur dalam peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan BSSN, mengingat hal tersebut bersifat lintas sektor dan perlu memberikan fungsi pengendalian kepada BSSN dalam pelaksanaan pengamanan IIKN.



Jakarta, Oktober 2019

lomor : B. /Seskab/Polhukam/10/2019

Sifat : Segera

Lampiran: -

: Pengamanan Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional Kepada Yth.:

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara

di

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) nomor: R.677/KA,BSSN/PP.01,03/08/2019 tanggal 14 Agustus 2019 hal Laporan Perkembangan Hasil Mitigasi Pasca Insiden Padam Listrik 4 Agustus 2019 yang merekomendasikan salah satunya perlunya peningkatan pengamanan Infrastruktur Informasi Kritikal Nasional (IIKN) dan hasil pembahasan bersama antara Sekretariat Kabinet, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan BSSN dalam pertemuan tanggal 3 September 2019 di kantor Sekretariat Kabinet serta dengan memperhatikan hasil dari ASEAN Ministerial Conference on Cybersecurity 2019 di Singapura, bersama ini kami sampaikan bahwa pengaturan mengenai pengamanan IIKN seyoglanya diatur dalam peraturan yang lebih tinggi dari Peraturan BSSN, mengingat hal tersebut bersifat lintas sektor dan perlu memberikan fungsi pengendalian kepada BSSN dalam pelaksanaan pengamanan IIKN.

Dalam hal pengaturan pengamanan IIKN melalui Peraturan Presiden, maka Kepala BSSN perlu menyampaikan permohonan izin prakarsa penyusunan Rancangan Peraturan Presiden terlebih dahulu kepada Presiden.

Demikian, untuk menjadi perhatian Kepala BSSN

Sekretaris Kabinet

Premono Anun

Tembusan Yth.: Presiden RI, sebagai laporan.

11. Focus Group Discussion (FGD) tentang Pandangan Masyarakat dan pelaksanaan Nilai-nilai Pancasila di Kawasan Perbatasan Negara

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, dan Kominfo telah menyelenggaran FGD dengan tema Pandangan Masyarakat dan Pelaksanaan Nilainilai Pancasila di Kawasan Perbatasan Negara pada Bulan Septemkber dan November 2019 di Kota Pontianak dan Kota Kupang. Adapun Narasumber FGD antara lain dari akademisi maupun kepala Badan Kesbangpol Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Barat.

Hal-hal yang mengemuka pada FGD tersebut diantaranya Pancasila merupakan pemersatu bangsa, mengingat kita memiliki ribuan pulau dan ribuan etnis, serta sebuah identitas masyarakat Indonesia, tidak terkecuali masyarakat di perbatasan; Pancasila memiliki dimensi realitas dan idealis sebagai kesatuan sila yang harus dilakukan mulai dari kewajiban beragama, bersifat adil, menjaga gotong royong dan selalu optimis dalam memandang kehidupan; Pemahaman Pancasila harus dimasukkan kembali dalam kurikulum pendidikan formal, agar masyarakat memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dari sejak dini; dan Pemerintah harus menjunjung kearifan lokal dalam pembangunan di kawasan perbatasan.



FGD di Pontianak, Kalimantan Barat



FGD di Kupang, Nusa Tenggara Timur

12. Penyelenggaraan Kelompok Diskusi Terfokus Evaluasi Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur

Pemerintahan Presiden Jokowi Widodo, pada tanggal 25 Juni 2015 telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik yang bertujuan untuk menyerap aspirasi dan menyampaikan informasi tentang kebijakan dan program pemerintah.

Hal yang patut diperhatikan adalah terkait perangkat kehumasan yang harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi, termasuk di dalamnya media sosial sehingga dapat mengetahui kebutuhan publik. Lebih penting lagi, humas harus menjalin sinergi dan akrab dengan wartawan, agar dapat mengontrol informasi yang disampaikan kepada publik. Perhatian terhadap pengelolaan komunikasi publik Pemerintah penting dilakukan untuk menghindari kegaduhan serta blunder Pemerintah dalam hal diseminasi rencana maupun evaluasi kebijakan. Penguatan komunikasi publik Pemerintah seyogianya akan mampu meredam persebaran kabar bohong serta penyesatan infromasi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial serta pengingkaran terhadap pemerintahan berdaulat.



Indikator Kinerja (2)

"Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan".

Capaian Indikator Kinerja (2) diukur dengan membandingkan jumlah rancangan rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan jumlah rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sepanjang tahun 2018, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika menghasilkan *output* 62 rancangan rekomendasi atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Seluruh rancangan rekomendasi tersebut memperoleh persetujuan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Kabinet. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka capaian Indikator Kinerja (2) sebesar 98.38%, sebagaimana tampak dalam tabel 3.4.

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja (2) Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi		% Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja
		Output	Outcome	[(4):(3)]	[(5):(2)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase rancangan	100%	62	61	98.38%	98.38%
rekomendasi persetujuan atas					
permohonan izin prakarsa dan					
substansi rancangan					
perundang-undangan di					
bidang pertahanan,					
keamanan, komunikasi, dan					
informatika yang disetujui oleh					
Deputi Bidang Politik, Hukum					
dan Keamanan					

Sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* rancangan rekomendasi pada Indikator Kinerja (2) terdiri dari: 12 orang SDM, dokumen Standar Pelayanan, alokasi anggaran Rp 46.948.000 serta surat-surat yang masuk dari K/L terkait. Dalam penyusunan rancangan rekomendasi ini, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika terlibat aktif dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi antarkementerian. Uraian mengenai beberapa capaian Indikator Kinerja (2) beserta data dukungnya akan kami *highlight* berikut ini.

1. Kelompok Kerja Penyusunan RInpres tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2020-2024

Sekretariat Kabinet meruoakan salah satu anggota Kelompok Kerja Penyusunan RInpres tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) Tahun 2020-2024. Pada Rinpres ini peran Setkab masih sama dengan Rinpres terdahulunya yaitu sebagai pengawas. Sekretariat Kabinet berperan aktif dalam Kelompok Kerja ini menjadi *leader* bersama BNN dalam penyusunannya.

2. RUU Tentang Perlindungan Data Pribadi

Setkan telah bereperan aktif dalam pembahasan RUU Data Pribadi dan selalu melakukan pengawalan terhadap isi substansi rancangan. Saat ini RUU PDP sedang dalam tahap finalisasi untuk diajukan kepada DPR.

3. Otentikasi Keppres Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengalihan Penugasan Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Sudan Selatan Menjadi Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengalihan Penugasan Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Sudan Selatan Menjadi Kontingen Garuda Bhayangkara Satuan Tugas Formed Police Unit Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Misi Pemeliharaan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa di Republik Afrika Tengah, Sekretariat Kabinet mengirimkan surat kepada K/L terkait untuk menyebarluaskan informasi dimaksud.

4. RKeppres tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan Peningkatan Status 21 Komando Resor Militer

Sekretariat Kabinet melalui Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berperan aktif dalam pembahasan RKeppres tentang Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan Peningkatan Status 21 Komando Resor Militer, bersama K/L terkait.

Kogabwilhan diperuntukkan dalam operasi di wilayah agar lebih terfokus. Pembentukan Kogabwilhan diarahkan untuk mencapai *readyness* dalam penanganan krisis dan tugas Kogabwilhan sebagai penindak awal bila terjadi konflik di wilayahnya, baik OMP maupun OMSP, dan sebagai kekuatan penangkal bila terjadi ancaman dari luar.

Sekretariat Kabinet, melalui Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika menekankan bahwa penataan ulang gelar kekuatan TNI harus diselesaikan dulu karena bersifat mendasar dan menyentuh aspek

strategis seperti pengembangan kelembagaan 3 matra TNI, penetapan lokasi strategis, penataan postur dan kekuatan 3 matra TNI, perencanaan sampai penyusunan strategi operasi terintegrasi 3 matra, serta pengaturan Alutsista.

5. Permohonan Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi TNI

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah menyampaikan kepada Presiden tentang permohonan prakarsa penyusunan RPerpres tentang Sususnan Organisasi TNI mengingat dinamika perubahan lingkungan strategis dan peningkatan beban kerja TNI.

Setkab mendorong RKeppres Pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan dan Peningkatan Status 21 Komando Resor Militer, serta komitmen K/L terkait restrukturisasi kelembangaan TNI jika *Grand Desain* organisasi TNI telah disusun sebagai pedoman, serta diselaraskan dengan Sinkronisasi Penataan Gelar Kekuatan TNI dengan Pembangunan Nasional sebagaimana arahan Presiden terakhir pada Ratas 12 Januari 2017.

Selain itu Setkab juga mendorong sinergi kelembagaan 3 matra TNI, relokasi penetapan titik-titik strategis pertahanan 3 matra TNI, penataan postur kekuatan 3 matra TNI, pemenuhan Alutsista, serta mendukung kepentingan pembangunan nasional. Beberapa surat Menhan dan Panglima TNI (tembusan Seskab) tentang permohonan restrukturisasi organisasi TNI.

6. Perkembangan Penyusunan RPerpres tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2019 - 2024

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah menindaklanjuti tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2019 – 2024 (Jakumhanneg), dengan inti, draf RPerpres telah disusun berdasarkan saran masukan Setkab, namun benar-benar menjadi kebijakan Presiden yang dipedomani seluruh K/L, Pemda, serta seluruh komponen bangsa sebagai satu kesatuan integral dalam menjaga pertahanan negara secara sistemik. Selain itu saran dan Masukan Setkab pada intinya mengarahkan agar

muatan dan arah kebijakan merefleksikan pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2003 tentang Pertahanan Negara.

Jakumhanneg diarahkan untuk membangun sistem pertahanan negara dengan tujuan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, serta keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Komponen yang bertanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan tidak hanya komponen militer, namun harus mengerahkan unsur TNI, tetapi juga unsur nonmiliter (K/L dan Pemda) disertai sinergi pengembangan sistem dan mekanisme pengerahan, berikut suprastruktur dan infrastruktur secara tepat dan terukur.

7. Sinkronisasi Penyusunan *Masterplan* Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019

Presiden telah menetapkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 11 (sebelas) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, sehingga sejak tahun 2019 Pemerintah membangun sebelas PLBN dimaksud, terutama menghadirkan fungsi kepabean, keimigrasian, kekarantinaan dan keamanan, serta pelayanan kepelabuhanan. Sekretariat Kabinet mendorong K/L maupun Pemda diantaranya Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR (Ditjen Cipta Karya), Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai), Kementerian Perhubungan, Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Imigrasi), TNI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Pemda Provinsi Kepulauan Riau, Pemda Provinsi Kalimantan Barat, Pemda Provinsi Kalimantan Utara, Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Pemda Provinsi Papua untuk segera menyelesaikan Inpres dimaksud dalam kurun waktu dua tahun sejak ditetapkan.

Setkab mendorong finalisasi rancangan pembangunan 11 PLBN sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, khususnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi K/L terkait di PLBN, yaitu bidang CIQ (*Custom, Immigration, Quarantine, Security*). Pembangunan 11 PLBN gelombang kedua diprioritaskan pada 4 PLBN yang akan dibangun terlebih dahulu yakni PLBN Jagoi Babang, PLBN Long Midang, PLBN Sei Nyamuk, dan PLBN Sota. Namun demikian, hingga Bulan

Oktober 2019 hanya PLBN Sota yang telah mulai dilakukan pembangunan fisik (diperkirakan akan selesai pada akhir Desember 2019).

8. Penajaman Rinpres dan Rencana Aksi tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara Aruk, Motaain, dan Skouw

Nawacita ketiga Presiden Joko Widodo adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, Pemerintah telah membangun dan mengoperasikan tujuh (7) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai beranda depan negara. Ketujuh PLBN dimaksud berada di Aruk, Badau, dan Entikong (Kalimanatan Barat), Motaain, Motamasin, dan Wini (Nusa Tenggara Timur), serta Skouw (Papua). Presiden juga meminta tidak hanya membangun PLBN saja, tetapi juga harus dilanjutkan dengan membangun perekonomian di perbatasan.

Saat ini, Pemerintah (Kementerian PUPR, Bappenas, dan BNPP) telah menyiapkan RInpres tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan Aruk, Motaain, dan Skouw. Masterplan dari percepatan pembangunan dimaksud disusun oleh Kementerian PUPR, Bappenas, dan BNPP. Sektor-sektor yang akan dikembangkan yakni Sektor unggulan yang akan dikembangkan adalah perkebunan lada, sentra industri kelapa sawit, kawasan pertanian terpadu dan pembangunan sentra industri perikanan (Aruk, Kab. Sambas, Kalimantan Barat); Komoditas penting yang dihasilkan adalah ternak sapi, serta hasil tanaman seperti jagung dan bawang merah (Motaain, Kab. Belu, Nusa Tenggara Timur); dan Komoditas yang akan dikembangkan di Skouw adalah hasil perikanan, padi, dan pariwisata. (Skouw, Kota Jayapura, Papua).

Percepatan pembangunan ekonomi di tiga (3) lokasi tersebut akan ditunjang dengan pembangunan sejumlah infrastruktur jalan (nasional, provinsi, dan kabupaten), bendungan, irigasi, sanitasi publik, pasar, fasilitas penunjang pariwisata, jaringan internet, dan listrik.

9. Rencana Perubahan atas Perpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Dalam draf RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, BNPB termasuk sebagai salah satu instansi yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif. Pengaturan jabatan ASN tertentu (khususnya Jabatan Pimpinan Tinggi) dalam Perpres organisasi K/L justru menciptakan keteraturan dan membatasi ruang jabatan yang dapat diisi bagi prajurit TNI dan anggota Polri, mengingat dalam UU hanya mengatur secara umum atau lingkup besar organisasi K/L. Dalam pembahasan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, perlu dirumuskan norma yang mengatur (sebagai pembatasan) bahwa jabatan ASN tertentu atau Jabatan Pimpinan Tinggi tertentu yang dapat diisi oleh prajurit TNI diatur lebih rinci dalam Perpres organisasi K/L yang bersangkutan.

Terhadap usul perubahan atas Perpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana sendiri, Mensesneg melalui surat nomor: B-1099/M.Sesneg/D-1/HK.03.00/9/2019 tanggal 30 September 2019 kepada Menpan RB menyampaikan pada intinya perubahan Perpres dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan bencana pada masa tanggap darurat; dan untuk dilakukan pengkajian sekaligus Menpan-RB menjadi Pemrakarsa penyusunan RPerpres mengenai perubahan dimaksud.

Bencana merupakan keadaan kontingensi, sehingga perlu cara yang tidak biasa dalam penanganannya, termasuk dalam penyiapan sumber daya manusia dan organisasi yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana. Informasi yang kami peroleh, saat ini untuk jabatan Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB masih diisi oleh Pelaksana Tugas, dan untuk jabatan Direktur Tanggap Darurat masih kosong. Proses penanganan terhadap usul perubahan Perpres Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana apabila dilakukan dengan prosedur biasa akan melalui beberapa tahap.

10. Pembahasan RPerpres tentang Program Pembangunan dan Pemeliharaan Kapal Selam

Draf terkahir RPerpres (2017) telah melalui proses harmonisasi dan ditandatangani Menko Polhukam, Menhan, Menkeu, Mensesneg, MenBUMN, dan Menkumham (*Seskab tidak dimintai paraf, hanya dimintai pendapat yang secara substantif pun tidak diadopsi dalam draf RPerpres terakhir*), untuk selanjutnya pada tanggal 7-3-2017 diajukan Mensesneg kepada Presiden. Penggunaan sebutan "Kapal Selam sekelas U-209" berpotensi membuka gugatan pihak Jerman selaku pemilik *property right* dan teknologi inti.

KKIP menjelaskan urgensi penetapan RPerpres P3KS adalah menjamin konsistensi pelaksanaan program P3KS agar tidak terpengaruh dinamika pergantian pejabat; memastikan kelanjutan pengadaan Kapal Selam (KS) sekelas U-290 (melalui joint production hingga whole local content) mengingat pengadaan KS dengan kelas berbeda berimplikasi memicu pembiayaan besar untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan kapabilitas SDM yang berbeda, serta tidak menjamin proses integrasi/produksi dilakukan di Indonesia; dan mengikat komitmen dan kepatuhan K/L untuk mendukung suksesnya P3KS, dengan memasukkan program/kegiatannya sesuai peran di masing-masing sektor.

Dalam Sidang KKIP tahun 2015 dan 2016 serta beberapa Ratas, Presiden menekankan setiap kerja sama dengan negara lain harus ada kejelasan hak Indonesia atas ToT (khususnya teknologi kunci), *property right*s, perhitungan besaran biaya secara tepat dan efisien, serta hak pemasaran atas produk yang dikerjasamakan. Kebijakan Presiden dimaksud butir (2) perlu mendapat perhatian mengingat prosedur serupa juga berpotensi terjadi dalam P3KS mulai tahap *Batch*-II karena menerapkan konsep *joint production* KS ke-4, ke-5 dan ke-6. Sebagai catatan, sesuai laporan Timlak KKIP, saat ini pun pengadaan KS di *Batch*-I (KS ke-1, ke-2 dan ke-3) masih menghadapi masalah *Transfer of Technology* (ToT).

Indikator Kinerja (3)

"Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan"

Capaian Indikator Kinerja (3) diukur dengan membandingkan jumlah rancangan rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan jumlah rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sepanjang tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika menghasilkan *output* 10 rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika, yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Seluruh rancangan rekomendasi tersebut memperoleh persetujuan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Kabinet. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka capaian Indikator Kinerja (3) sebesar 100%, yang digambarkan dalam tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja (3) Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi		% Realisasi Kinerja	% Capalan Kinerja
		Output	Outcome	[(4):(3)]	[(5):(2)]
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan,	100%	10	10	100%	100%

Komunikasi, dan			
Informatika yang			
disetujui oleh Deputi			
Bidang Politik, Hukum			
dan Keamanan			

Sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan *output* rancangan rekomendasi pada Indikator Kinerja (3) terdiri dari: 12 orang SDM, dokumen Standar Pelayanan, surat-surat serta nihil anggaran (revisi anggaran pertengahan 2019). Dalam penyusunan rancangan rekomendasi Indikator Kinerja (3), Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berpartisipasi aktif mengikuti rangkaian kegiatan rapat-rapat koordinasi antar-kementerian/lembaga untuk penyiapan materi substansi. Selain itu, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika juga melakukan penyiapan bahan substansi Sekretaris Kabinet tentang isu-isu pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang menjadi topik pembahasan dalam Rapat Terbatas dan/atau Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden, yang sebagian capaiannya dapat kami *highlight* dalam LKj ini.

1. Butir Wicara Presiden pada Rapat Pimpinan TNI Tanggal 29 Januari 2019

TNI diharapkan dapat berperan dalam mendukung tercapainya sasaran-sasaran strategis Pemerintah. Presiden meminta jajaran TNI untuk menjaga stabilitas pertahanan Negara, agar agenda pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara optimal dalam rangka menjaga kesejahteraan rakyat dan kewibawaan Negara. TNI sebagai kekuatan utama dalam sistem pertahanan Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan Negara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai dengan usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama. Presiden sudah memutuskan untuk bahwa batas usia

pensiUn khusus bintara dan tamtama akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga menjadi 58 (lima puluh delapan) tahun, sama dengan batas usia pension perwira. Saya sudah perintahkan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Menteri Hukum dan HAM, serta menteri terkait lainnya untuk membahas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 bersama DPR. Presiden juga memerintahkan Panglima bersama Menteri Pertahanan untuk menyelesaikan Grand Design Organisasi TNI Tahun 2019-2024.

2. Bahan Rapat Intern dengan Presiden tentang Pertahanan

Pasal 13 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Haneg) mengatur kebijakan umum pertahanan negara ditetapkan oleh Presiden, yang dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan Sistim Haneg selaras dengan RPJMN. Pertahanan Negara bersifat semesta, dilaksanakan berdasarkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Haneg disusun berdasarkan prinsip demokrasi, HAM, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, hukum nasional dan internasional, kebiasaan internasional dengan prinsip hidup berdampingan secara damai, serta mempertimbangkan dinamika perkembangan lingkungan stratgis nasional, regional, dan global.

Dinamika lingkungan strategis nasional (dinamika aksi teror, gerakan separatis, bencana alam, dinamika politik seperti penyelenggaraan Pemlu 2019), regional (dinamika semenanjung Korea, Laut Cina Selatan, konflik Palestina, dan terorisme) dan global (memanasnya hubungan AS-Rusia dan AS-Cina, dinamika cyber sebagai media strategis propaganda aksi ilegal lintas negara), sebagi wujud ancaman, resiko maupun peluang. Faktor geopolitik (wawasan nusantara) dan geostrategi mengingat posisi strategis Indonesia sebagai negara maritim yang berada di antara 2 benua dan 2 samudera. Tujuan dan kepentingan negara memperhatikan kaidah tata kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dicapai melalui pembangunan berkelanjutan, dengan memanfaatkan seluruh potensi dan kekuatan nasional yang didayagunakan menyeluruh dan terpadu.

Pemerintah telah menetapkan bahwa RKP tahun 2019 fokus pada obtimalisasi pemanfaatan seluruh sumberdaya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Presiden jelas telah menetapkan sasaran makro pembangunan 2019. Dengan tema 'Pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas' telah ditetapkan 5 prioritas pembangunan nasional, bidang pertahanan masuk prioritas ke 5 yaitu 'stabilitas keamanan *nasional dan kesuksesan Pemilu'*.

3. Permohonan Kehadiran Presiden dalam Puncak Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) 2019

HANI diperingati setiap tanggal 26 Juni dan tahun ini peringatan HANI 2019 akan diselenggarakan di Jakarta, tanggal 26 Juni 2019 di Gedung The Tribrata, Jakarta Selatan, dengan bentuk kegiatan berupa Dialog Nasional dengan tema "Milenial Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas". Presiden diharapkan dapat hadir pada puncak acara kegiatan ini. HANI merupakan wujud keprihatinan global sekaligus kepedulian terhadap ancaman bahaya narkoba untuk bersamasama mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Sasaran bidang pertahanan dan keamanan dalam RPJMN 2015-2019 sebagaimana telah ditetapkan melalui Perpres Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, salah satunya adalah menguatnya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Presiden dalam beberapa kali kesempatan Ratas menyampaikan salah satunya bahwa semua pihak harus memberikan dukungan optimal terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Presiden juga telah mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019.



4. Usulan Rapat terbatas tentang Pembahasan *Masterplan* Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan Negara

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tengah menyusun master plan pembangunan ekonomi di tujuh kawasan sekitar tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Hal ini merupakan kelanjutan dari arahan Presiden agar pembangunan PLBN dilanjutkan dengan pembangunan perekonomian untuk kesejahteraan rakyat. Tujuh master plan tersebut disusun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Master plan pada intinya berisi beberapa pokok diantaranya, pembangunan fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan perekonomian untuk memaksimalkan potensi ekonomi masing-masing wilayah perbatasan, pembangunan infrastruktur penunjang antara lain jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, bendungan dan irigasi, puskesmas, pasar, serta sekolah. Selain itu pada Rapat Terbatas dimaksud akan dipaparkan konsep master plan oleh Menko Bidang Perekonomian, Menteri PUPR, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Kepala

BNPP, serta Sekretaris Kabinet apabila dirasa perlu. Apabila Presiden menyetujui, *master plan* dimaksud akan ditetapkan dalam bentuk Instruksi Presiden sekaligus sebagai perintah kepada K/L dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dalam kurun waktu dua tahun.

5. Penyampaian Bahan Pidato Kenegaraan Presiden

Sekretariat Kabinet, melalui Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah menyiapkan bahan paparan Presiden pada saat Sidang Bersama DPR dan DPD tanggal 16 Agustus 2019, diantaranya,

Di Bidang Pertahanan dan Keamanan yakni menata ulang gelar kekuatan TNI di titik-titik strategis pertahanan negara diselaraskan dinamika pembangunan nasional; Membangun sinergi dan integrasi sistem pertahanan negara guna mencegah dan menangkal potensi ancaman dari kawasan Laut Cina Selatan, Oseania, dan Asia-Pasifik; mengurangi ketergantungan pemenuhan kebutuhan Alpalhankam dari produk industri pertahanan luar negeri; Membangun dan mengembangkan industri pertahanan dalam negeri guna meningkatkan daya saing produk industri pertahanan di tataran pasar nasional maupun internasional; dan mencegah berulangnya peristiwa embargo Alpalhankam dan suku cadang oleh negara asal produsen Alpalhankam, (contoh: embargo AS atas suku cadang Pesawat Tempur F16).

Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Wilayah Perbatasan, Setkab mendukung program pemerintah untuk melaksanakan pembangunan secara merata, mengutamakan wilayah perbatasan, dan menyesuaikan dengan karakteristik wilayah perbatasan masing-masing (desentralisasi asimetris). Saat ini, Pemerintah telah menyiapkan RInpres tentang percepatan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan Aruk, Motaain, dan Skouw. Percepatan pembangunan ekonomi tersebut akan ditunjang dengan pembangunan sejumlah infrastruktur jalan (nasional, provinsi, dan kabupaten), bendungan, irigasi, sanitasi publik, pasar, fasilitas penunjang pariwisata, jaringan internet, dan listrik.

Sedangkan di Bidang Komunikasid an Informatika, Setkab mendorong penguatan dan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemda dalam pemberatasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta precursor;

menyusun pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemda dalam melaksanakan aksi pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta prekursor; dan memastikan target-target Rencana Aksi Nasional kementerian, lembaga, dan pemda dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta prekursor tercapai.

6. Permohonan Presiden Memberi Ceramah Pembekalan TNI

Presiden memberikan ceramah pembekalan kepada Calon Perwira Remaja TNI dan Polri Tahun 2019, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, bertempat di Istana Bogor.

Ceramah pembekalan Presiden kepada para calon Perwira Remaja TNI dan POLRI telah menjadi kebiasaan ketatanegaraan, serta diperlukan untuk membangun kesadaran, sikap dan mental pengabdian pada negara, khususnya dalam pengamanan segala kepentingan serta pelayanan kepada masyarakat

7. Usulan Topik Rapat Terbatas "Percepatan Penyusunan Rencana Kontinjensi Penanggulangan Bencana"

Isu penanggulangan atau mitigasi bencana telah beberapa kali dibahas dalam rapat terbatas maupun sidang kabinet, antara lain pada tanggal 16 Oktober 2018 dan 14 Januari 2019, dimana arahan *Presiden* intinya untuk memperkuat dan mengintegrasikan kemampuan deteksi bencana yang tersebar di BNPB, BMKG, dan K/L lainnya, mempersiapkan manajemen bencana, dan melakukan edukasi kebencanaan. Rencana kontijensi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 ayat (3) PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana selama ini kurang mendapat perhatian karena amanatnya hanya bersifat "dapat", padahal dalam praktik merupakan keharusan (*must*), sebagai dasar atau pedoman penanggulangan bencana dalam keadaan darurat. Inpres diperlukan guna akselerasi penyusunan rencana kontijensi penanggulangan bencana di daerah serta manajemen bencana yang lebih baik. Oleh karena itu, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika mengusulkan untuk diagendakan Rapat Terbatas guna mendapatkan persetujuan Presiden.



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka menunjang keberhasilan Kabinet Kerja, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada II. Para Menteri Kabinet Kerja;
 - 2. Sekretaria Kabinet;
 - 3. Kepala Kepalisian Negara Republik Indonesia;
 - 4. Jaken Agung Republik Indonesia:
 - 5. Panglima Tentura Nasional Indonesia;
 - 6. Kepala Badan Intelijen Negara;
 - 7. Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 - 8. Para Gubernur:
 - 9. Para Bupati/Walikota.

Untuk

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang dipertukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka mendukung pelaksansan komunikasi publik, dengan:

I. menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala;

2. memeharlusakan ...

8. Bahan Rapat Internal Presiden tentang Papua

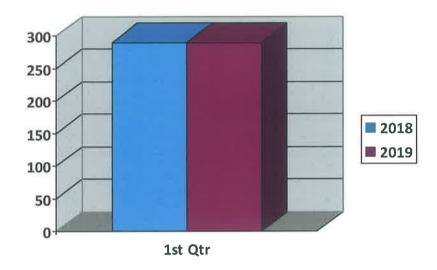
Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah, khususnya pembangunan di berbagai sektor secara masif serta pengembangan instrumen politik dan institusi/perangkat pemerintahan di Papua dan Papua Barat pada kenyataannya dianggap sebagian masyarakat Papua dan Papua Barat belum maksimal menyelesaikan inti masalah. Penyelesaian masalah tidak sekedar menyentuh masalah pembangunan yang telah ada namun perlu memperhatikan berbagai faktor, seperti tuntutan masyarakat Papua.

Perlu dilakukan beberapa upaya, diantaranya membangun dialog konstruktif bermartabat melibatkan komponen tokoh masyarakat pro maupun kontra integrasi, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda untuk mengadopsi dan mencari kesepahaman akar masalah dan solusi terbaik di berbagai sektor; mengevaluasi hasil implementasi kebijakan terkait Papua, khususnya kebijakan Otsus Papua sebagai modal perumussan kebijakan terbaik selanjutnya; mengarusutamakan pendidikan dan penginternalisasian pemahaman bahwa NKRI terdiri dari berbagai komponen ras, suku dan agama, salah satu diantaranya adalah ras Melanesia Papua. Papua adalah

bagian integral NKRI; dan mengedukasi seluruh lapisan masyarakat untuk terus meningkatkan kesadaran dan ketulusan dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak menerima masyarakat Papua sepenuhnya. Sebaliknya, masyarakat papua di segala lini juga diberi pemahaman bahwa seluruh masyarakat Indonesia 'mencintai masyarakat Papua dengan sepenuh hati'.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berhasil mempertahankan capaian sasaran strategis dan indikator kinerja dalam dua tahun terakhir yaitu periode tahun 2018-2019, dengan nilai rata-rata 100%. Meskipun demikian, data menunjukkan terjadi tren jumlah yang sama terhadap capaian output dalam dua tahun terakhir. Hal ini terjadi karena produk yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika hanya berupa rancangan rekomendasi yang berbasis pada pengolahan dan analisis terhadap suratsurat yang berasal dari eksternal Sekretariat Kabinet, yang tidak dapat diprediksi jumlahnya setiap tahun. Dalam hal ini, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika membantu Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet melalui penyusunan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan pada suatu waktu tertentu, tidak membuat program yang murni independen seperti lazimnya dilakukan oleh kementerian/lembaga teknis lainnya. Realisasi output 290 rancangan rekomendasi di tahun 2018 tersebut volumenya tetap jika dibandingkan dengan output tahun 2019 sejumlah 290 rancangan rekomendasi. Tren volume output dalam dua tahun terakhir dapat digambarkan berikut ini.

Grafik 3.2
Tren Volume *Output* Periode 2018-2019



Perbandingan volume *output* dan capaian kinerja keseluruhan selama dua tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.6
Perbandingan Volume *Output* dan Capaian Kinerja 2018-2019

			2018		2019		
Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Volume Output	Capaian Kinerja	Target	Volume Output	CapaianKine rja
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan,	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	100%	228 rancangan	100%	100%	218 rancangan	100%
Komunikasi, dan Informatika	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	100%	45 rancangan	100%	100%	62 rancangan	98,38%

					Г	1
Persentase rancangan rekomenc terkait materi sidang kabinet, rap atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidar Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yan disetujui oleh Deputi Bidang Polit Hukum dan Keamanan.	g 100%	17 rancangan	100%	100%	10 rancangan	100%

Secara keseluruhan, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika memberikan manfaat kinerja yang cukup efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

- Peran dan posisi Sekretariat Kabinet dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antarkementerian dan lembaga, serta kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah.
- 2. Munculnya isu-isu penting di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu dikaji, dianalisis, dan dievaluasi.
- 3. Keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota dalam Tim, Panitia, atau Kelompok Kerja terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika pada tahun 2019 dapat dikategorikan sangat baik dan berhasil mempertahankan capaian kinerja tahun sebelumnya, namun pelaksanaannya dirasakan belum optimal dalam memberikan dukungan manajemen kabinet karena terdapat beberapa kendala yaitu:

- a. Dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah, baik internal maupun eksternal, sehingga mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas.
- b. Belum tersedianya sistem aplikasi berbasis IT yang terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya untuk mempercepat penyelesaian tugas-tugas mendesak yang menjadi prioritas Presiden.

c. Sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet yang belum efektif, sehingga berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis.

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka melakukan optimalisasi, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kegiatan penyusunan rekomendasi, serta pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika perlu difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.
- b. Optimalisasi pengelolaan anggaran melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.
- c. Peningkatan kualitas tata laksana dan sumber daya manusia dalam proses pengkajian, penyusunan rekomendasi dan evaluasi kebijakan melalui keikutsertaan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta kebutuhan organisasi ke depan.
- d. Peningkatan koordinasi dengan K/L terkait untuk membangun jejaring melalui keikutsertaan dalam kelompok kerja/tim/panitia antarkementerian dan berperan aktif pada rapat-rapat koordinasi untuk *debottlenecking* permasalahan-permasalahan yang membutuhkan terobosan penyelesaian segera.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

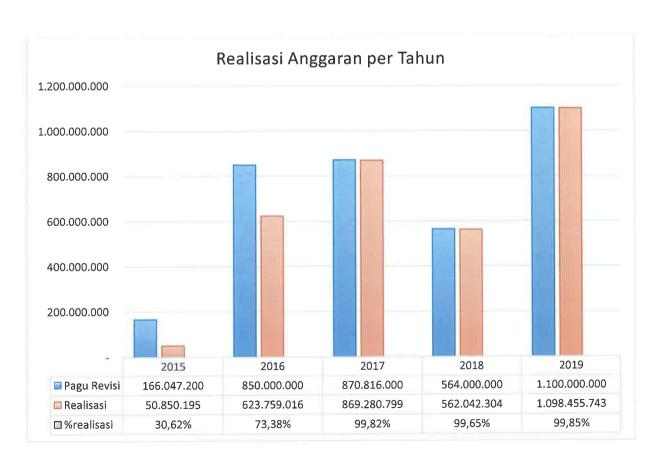
Kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika tahun 2019 didukung anggaran sebesar Rp 1.100.000.000,00. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berhasil merealisasikan anggaran untuk mewujudkan target kinerja dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang telah diperjanjikan dengan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan ditandatangani pada bulan Januari 2019. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan tiga komponen kegiatan yang terdiri dari:

- (i) penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika;
- (ii) penyusunan rancangan rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika; dan
- (iii) penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Anggaran 2015-2019

TAHUN	PAGU REVISI			REALISASI	% REALISASI
2015	Rp	166,047,200.00	Rp	50,850,195.00	30.62%
2016	Rp	850,000,000.00	Rp	623,759,016.00	73.38%
2017	Rp	870,816,000.00	Rp	869,280,799.00	99.82%
2018	Rp	564,000,000.00	Rp	562,042,304.00	99.65%
2019	Rp	1,100,000,000.00	Rp	1,098,455,743.00	99.85%

Grafik 3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2015-2019



Sedangkan pada Tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika berhasil merealisasikan anggaran sebesar 99,85%. Anggaran yang telah direalisasikan untuk membiayai ketiga komponen kegiatan dimaksud sebesar Rp 1.098.455.743,00 dari total pagu anggaran Rp 1.100.000.000,00. Efisiensi anggaran berhasil dilakukan sebesar Rp 1.544.257,00 yang diperoleh dari penghematan biaya perjalanan dinas. Realisasi anggaran tersebut menghasilkan 290 rancangan rekomendasi di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika dengan komposisi sebagai berikut.

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran Kegiatan dan Efisiensi Anggaran Tahun 2019

Kegiatan: Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan,

Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

No	Komponen Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi I Output	Capaian	Efisiensi Anggaran
1,	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Rp 1.062.567.000	Rp 1.061.509.243 (218 rancangan rekomendasi)	99,9%	Rp 1.057.757
2.	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundangundangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	Rp 37.433.000	Rp 36.946.500 (62 rancangan rekomendasi)	98.7%	Rp 486.500
3.	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika	-	(10 rancangan rekomendasi)	æ	-
	Total	Rp 1.100.000.000	Rp 1.098.455.743 (290 rekomendasi)	99,85%	Rp 1.544.257

Data pada tabel 3.8 di atas, menunjukkan bahwa terjadi revisi anggaran komponen kegiatan, tetapi dengan besaran jumlah anggaran sebesar Rp 1.100.000.000,000 yang digunakan untuk membiayai tiga kegiatan diantaranya (1) Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika sebesar Rp 1.062.567.000 (218 rekomendasi); (2) Penyusunan rancangan rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika sebesar Rp 37.433.000,00 (62 rekomendasi); dan (3) Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika tidak dianggarkan pada pagu anggaran (10 rekomendasi).

Pada kegiatan ketiga, atau *Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika Output tidak membutuhkan anggaran dalam penyiapannya karena proses koordinasi dengan K/L terkait dapat dilakukan dengan fasilitas teknologi informasi untuk menghilangkan biaya-biaya.*

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan atas capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika sepanjang tahun 2019. Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja antara pejabat eselon II Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika dengan pejabat eselon I Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Perencanaan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2019 mencakup 1 (satu) sasaran strategis, yang dilaksanakan melalui 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan, serta diukur dengan menggunakan tiga Indikator Kinerja. Capaian kinerja atas sasaran strategis "Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika" tersebut mencapai nilai ratarata 99,65% (kategori sangat baik). Adapun capaian kinerja untuk indikator kinerja rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan "Persentase rancangan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan" mencapai nilai rata-rata 100% (kategori sangat baik), "Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan" mencapai nilai rata-rata 98,38% (kategori sangat baik), dan "Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan" mencapai nilai rata-rata 100% (kategori sangat baik).

Sepanjang tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika menghasilkan *output* 290 rancangan rekomendasi yang

disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang terdiri dari: 218 rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan, 62 rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan, dan 10 rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Adapun realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Tahun 2019 mencapai Rp 1.098.455.743,00 atau setara 99,85% dari total pagu anggaran atau Rp 1.100.000.000,00.

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika telah dapat memperlihatkan kinerja untuk memenuhi sasaran stategis dengan indikator-indikator yang ditetapkan di awal tahun, serta merealisasikan kegiatan-kegiatan dengan cukup. Keberhasilan ini harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan, serta perlu berbagai upaya mengatasi berbagai kendala-kendala yang selalu timbul Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan, seperti:

- meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya;
- 2. memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia;
- 3. mengikutsertakan dalam keanggotaan tim yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 4. berkoordinasi dengan instansi terkait dan mengadakan pertemuan internal untuk koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- 5. memonitor dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dan benar secara berkala dan berkelanjutan
- 6. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi akuntabilitas Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika tahun 2019, serta menjadi masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

No.	Sasaran Program/Keglatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang petahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100 Persen

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, Januari 2019 Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Edwin Jeffry Herald Wuisang, a H., M.M., M.H.

Kegiatan

Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

 Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Rp.1.026.988.000,-

 Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika Rp.46.948.000,-

 Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Inf

Rp.26.064.000,-

Total Anggaran

Rp.1.100.000.000,-

Pihak Kedua, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, Januari 2019 Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Dr. Padlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M.,

M.H.

TARGET CAPAIAN RENJA K/L TA 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA 2. PROGRAM

3. SASARAN PROGRAM 4. KEGIATAN

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 6. SASARAN KEGIATAN

: SEKRETARIAT KABINET

: 06 - Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
: 01 - Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan
: 5018 - Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
: Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

								Persentase rancangan Pertahanan, Keamana O1.01 dan Keamanan	01 Terwujudnya Rancangan K	KODE	
CAPALAN IKK Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan CAPALAN IOK YANG DISETUJUI CAPALAN IKK Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan CAPALAN IOK YANG DISETUJUI	CAPAIAN IKK In rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangar hanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Keamanan CAPAIAN IOK YANG DISETUJUI CAPAIAN IKK CAPAIAN IKK In rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin eh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, g disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	CAPAIAN IKK n rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangar hanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Keamanan CAPAIAN IOK YANG DISETUJU! CAPAIAN IKK	CAPAIAN IKK n rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangar hanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Keamanan CAPAIAN IOK YANG DISETUJUI	CAPAIAN IKK sın rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangar hanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Keamanan	CAPAIAN IXX		CAPAIAN IOK YANG DISETUJUI	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	
100								100	nformatika	VOLUME/ TARGET	TA
Persentase Persentase	Persentase Persentase	Persentase	Persentase	Persentase				Persentase		SATUAN	TAHUN 2019
100%	100%	100%	100%	100%		115%	23	100%		1	
100%	100%	100%	100%	100%		53%	13	100%		2	
150%	3 150% 100%	3 3	w		100%	71%	15	100%		w	
100%	100%	100%	w		100%	11456	322	100%		4	
100%	100%	40.00	TAVE	4	100%	83%	15	100%		s	RENC
100%	100%		133%	4	100%	91%	10	100%		6	RENCANA REALISASI BULAN KE-
2		100%	100%	3	100%	119%	19	100%		7	ASI BULAN I
*		100%	100%	S	100%	105%	22	100%		00	F
2		100%	60%	3	100%	93%	14	100%		w	
0		100%	114%	60	100%	92%	23	100%		10	
1	Ì	100%	110%	12	100%	105%	20	100%		E	
0		100%	300%	6	100%	120%	12	100%	Ī	12	

7. RINCIAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN	TAH!	TAHUN 2019		1	1 2	-	1 2	1 2 3 4	1 2 3 4	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	RENCANA REALISASI BULAN KE-	RENCANA REALISASI BULAN KE-	1 2 3 4 5 6 7 8 9
1		TARGET	3710714	-	4	,	,	,		,		,	à	:	;
01	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	rmatika													
01.001	Rancangan Rekomendasi kebijakan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	160	Rancangan Rekomendasi	11	13	14	19	12	14	18	18	18	10	7	и
	CAPAIAN OUTPUT			28	20		31	25	14	22	27	22	32	30	16
01.001.009	Tanga Sub Output														
01.001.009.216	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan informatika	142	Rancangan Rekomendasi	10	11	12	17	10	12	16	16	16	10	7	v
	CAPAIAN KOMPONEN			20	14	21	28	100	11	16	21	15	25	19	10
01.001.009.217	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan informatika	9	Rancangan Rekomendasi	1	1	1	н	н	1	ь	ь	1	0	0	0
The same of the sa	CAPAIAN KOMPONEN			7	en	2	3	5	3	u	sn	Un	7	10	6
01.001.009.218	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika:	10:	Rancangan Rekomendasi	1	1	14	1	1	1	L.	1	1	0	0	0
	CAPAJAN KOMPONEN			1	0	N.	0	2	0	2	1	2	0	1	0

REALISASI ANGGARAN
Per Pengelola Keglatan Per Keglatan Output SubOutput Komponen Akun
Periode s.d. 31 Desember 2019

Berdasarkan Kurtansı Halaman : 1 dan 2

Kementian Unit Organisasi Satuan Kerja DIPA No. Tgl.

: SEKRETARIAT KABINET : SEKRETARIAT KABINET : SEKRETARIAT KABINET : DIPA No. SP DIPA: 114.01-0/AG/2019 Tgl. 12 Desember 2018

524111-RM 524113-RM	521211-RM	7	d.	218 P	524119-RM		524114-RM	524113-RM	521211-RM	**************************************		224	DI-61757C	524119-RM		524114-RM	524113-RM	524111-RM	522151-RM	521211-RM	E.	2	216 Pr	001.009		SAMPLE THE	KEAMANAN,	7010	Į,	03 DEPUTI POLITIK, H		
BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	BELANIA BAHAN	Komunikasi, dan Inf	atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadini oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pertahanan, Keamanan,	Penyusunan rancangan rekomendasi makeri sidang kabinet, rapat,	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	KOTA	BEBAN PERJALANAN DINAS PAIGET MEETING DALAM	BEBAN PERJALAHAN DINAS DALAM KOTA	BELANJA BAHAN	Komunikasi, dan Informatika	perundang-undangan di tetang Pertabahan Keamagan.	Penyasanan tenaanjan reconenaas perseajaan alas permanan	DEBAN YEKIMLANAN DINAS LAINNYA - DUAK REGEKI	BEBAN PERDALAHAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	KOTA	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM	BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA	BELANJA JASA PROFESI	BELANJA BAHAN	Komunikasi, dan Informatika	penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan,	Penyusuhan rancangan rekomendas atas rencana dan	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komusilasi, dan Informatika	the state of the s		KEAMANAN, KOMUNIKASS, DAN BUFORMATIKA	DESCRIPTION OF WALL OF THE PROPERTY OF THE PRO	ASDED BIDANG PERTAHANAN KEMANAN KEMBUKASI DAN INFORMATIKA	DEPUT] POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	HANAH REALEASI	Uraian
4,500,000	6.900,000			26.064.000	27.898.000		3.000.000	2.250.000	13.800.000			-0.3-0.000	342.090.000 000.000	169.529,000		7.800.000	9.450.000	295,711.000	129,600,000	72.200.000			1.026.988.000	1.100.000.000		10 100 100		COUNTY CARRELL	1.100.000,000	1.100.000.000	1.100.000.000	Pagu Awal
00	0			0	4.031.000		3,000,000	2.250.000	28.152.000			37.7033,000	330.4980.000	380.635,000		14,700,000	13.950.000	233.693.000	45,500,000	37.591,000			1.062,567,000	1.100,000,000		1 1K(10) 125		CAN CAN CASE	1.100.000.000	1.100,000,000	1.100.000.000	Pagu Revisi
0 0	0			0	4,031,000		3.000.000	2.250.000	27,665,500			30.370.300	25 000 500 500 409 709	286,685,734		14,700,000	13,070,000	156,296,180	45,329,000	37.585.000			606.130.618	643.077.118		VIII 7/10/11#9		147 077 :13	643.077.118	643.077.118	643.077.118	Realisasi UP
00	0			Q.	¢		۵	0	0			4	000,000,000	93,949,265		0	0	77.396.300	0	0			455.378.625	455.378.625		444 178720		48.5 378.60%	455.378.625	455.378.625	455.378.625	Realisasi LS
0	0			0	4.031.000		3.000.000	2.250.000	27,665,500			30,270,300	MO3 790 75	380,634,999		14.700.000	13.070.000	233.692.480	45.329.000	37.585.000			1,061,509,243	1.098.455.743		Det 184 880 140		1 124 455 TA 1	1 099,455 743	1.098.455,743	1.098.455.743	Realisasi LS Jumlah Realisasi
0,00	0,00			0,00	100,00		100,00	100,00	98,27			20,10	06.20	00,00		100,00	93,69	99,99	99,62	99,98			99,90	99,85		200		28 00	99,85	99,85	99,86	36
0 0	0			0	0		0	0	486.500			100.100	003 368	1 2 2 2		0	880,000	520	171,000	6,000			1.057.757	1.544,257		3.084.57		- 544.357	1544.257	1.544.257	1.544.257	Sisa Anggaran

TANGET CAPAJAN REBUA K/L TA 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA 2. PROGRAM 3. SASARAN PROGRAM

4. KEGIATAN

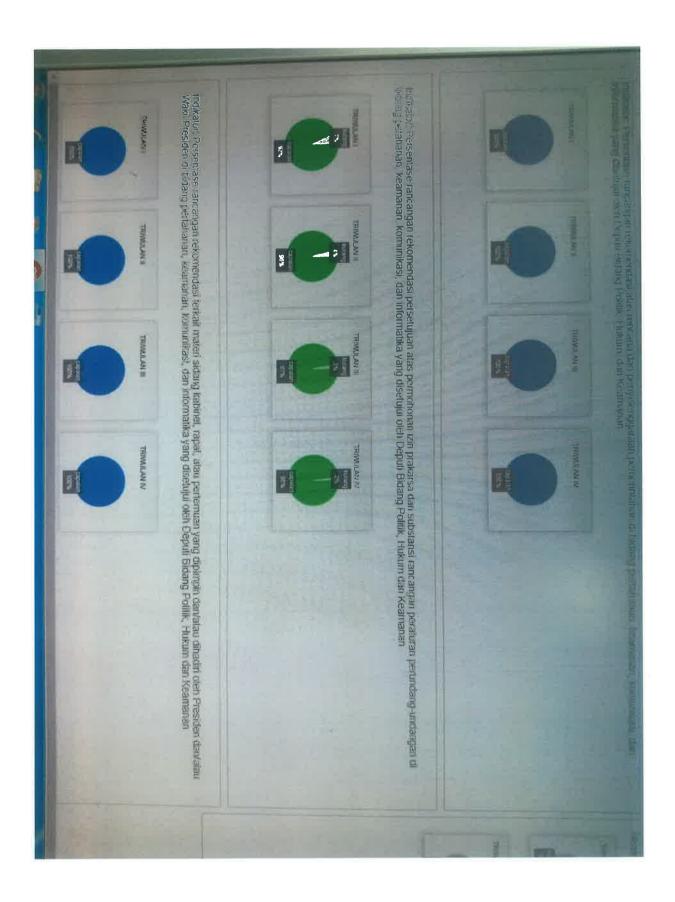
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 6. SASARAN KEGIATAN

SERRETARIAT KABINET
 106 - Program Dubungan Pengelobaan Manajerman Kabinet Kepada Presiden dan Waldi Presiden Delam Penyelenggaraan Pemerintahan
 101 - Terwajudnya retornendasi labbjakan yang berbuaikas di bidang politik, hukum, dan keamanan
 101 - Terwajudnya retornen Manajerman Kabinet di Bidang Pertahanan, keamanan, Komunikasi, dan Informatika
 5013 - Dubungan Pengeloban Manajerman Kabinet di Bidang Pertahanan, keamanan, Komunikasi, dan Informatika
 Autsten Daputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

1	60.100.10		01.001.02		10.1001.01	1007105	30011	
CAPAIANIOX	Jumlah rancangan rekomendasi terbait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri olah Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pertahunan, Kaamanan, Kominfo yang disumpulkan kapada Dapudi Bidang Polhukann	CAPAIANION	Jumleh rancangen rekomendesi persetujuan atas permohonan lein prakarua dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pertuhanan, Kaamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disampalitan tepada Depud Bidang Politik, Hukum, dan Kaamanan	CAPAIAN IOX	Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keemanan, Komunikasi, dan Informatika yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanam	Rancongon Rekomendasi kebijakan di bidang Pertahanan, Kommonon, Komunikosi, dan Informutko	OUTPUT KEGIATAN/INDHATOR OUTPUT KEGIATAN	
	φ		Ф		142	160	TANK!	HAT
	Rancangan Rekomendasi		Rancangan Rekomendasi		Retomendasi	Referencedant	SATUM	TAHUM 2019
1	н	7	S#6	20	10	E	ы	
0	1	6	1	14	11	13	2	
	1	2	۳	21	17	M	w	
0	H	ter	: H	28	17	1.9		
2	н	5	-	3.0	10	r.	Un	REN
0	ju)		-	11	12	z	•	ANA REALIS
2	ы	w	5544	16	16	E	7	RENCANA REALISASI BULAN KE-
1	н		1		16	Ħ	-	NE-
2	310	NA.	ga.	15	16	E		
0	0	7	Q	25	10	5	5	
1	0	10	0	19	7	7	E	
0	0		0		5	u	E	

Edwin Jeffy Herald Williams, S.H., M.M., M.H. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikas, dan Informatika

Jakarta, Januari 2020



TWH 100 00 0 0 35 07,43	Properties contracting personal personal personal personal states permotes and extensional contracting an endomentum personal personal states permotes and extensional contracting and extensional personal person	1760 142 142 218 218 150 TMC	TW0 100 120 154 164 100 150	100 100 12 12 112 112 100 100 100	Profit to the Common Co	794 St. Guideal Colonies Confider Controller S. S. St.	Pademannes Committee	
1.100.000.000		Nation 200 Nations			System description of the same series	Arganes No. 1941		

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M., M.H.

Jabatan : Asiaten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan

Informatika

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharuanya sesual lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Pertahanan,

Jakarta,

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Januari 2019

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Merenia

Edwin Jeffry Herald Wuisang, &H., M.M.,

M.H.

Perjanjian kinerja tahun 2019 Asisten deputi bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan Informatika

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	{2}	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamunun, Komunikasi, dan Informatika	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan subatansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang petahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	
 Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika 	Rp.1.026.988.000,-
 Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika 	Rp.46.948.000,-
 Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Inf 	Rp.26.064.000,-
Total Anggaran	Rp.1.100.000.000,-

Pihak Kedua, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Jakarta, Januari 2019 Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

fatuurus Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M., M.H.

TARGET CAPAIAN RENIA K/L TA 2019

: SEKRETARIAT KABINET : 06 - Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakii Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan : 01 - Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan : 5018 - Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika : Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA
2. PROGRAM
3. SASARAN PROGRAM
4. KEGIATAN
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)
6. SASARAN KEGIATAN

		TAHU	TAHUN 2019					RENC	RENCANA REALISASI BULAN KE-	ASI BULAN K	(E-				
коре	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERIA KEGIATAN (IKK)	VOLUME/ TARGET	SATUAN	1	2	m	4	so.	9	7	60	6	10	11	12
10	Terwujudnya Rantangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	matika													
	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum	100	Persentase	%001	7001	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.01	dan Keamanan														
	CAPAIAN IOK YANG DISETUIUI			23	13	15	32	15	10	19	22	14	23	20	12
	CAPAIAN IKK			115%	9336	71%	114%	83%	91%	119%	105%	93%	92%	105%	120%
01.02	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100	Persentase	100%	3000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	CAPAIAN IOK YANG DISETUJUI			9	S	10	3	4	4	3	- 2	3	60	11	9
	CAPAIAN IKK			86%	83%	150%	100%	80%	133%	100%	100%	%09 60%	114%	110%	100%
01.03	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakii Presiden di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	CAPAIAN IOK YANG DISETUJUI			1	0	1	0	2	0	2		2	0	7	0
	CAPAIAN HOK			300%	760	100%	260	100%	100%	100%	100%	30001	100%	100%	100%

7. RINCIAN KEGIATAN

		TAHUN 2019	67(RENCA	NA REALISA.	RENCANA REALISASI BULAN KE-	. 6.				
KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN VOLI	VOLUME/ S	SATUAN	1	2	60	*	מו	w	7	80	6	D	#	11
10	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	ika													
100.10	Rancangan Rekomendasi kebijakan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika		Rancangan Rekomendasi	12	13	14	19	77	14	18	18	18	10	7	ιn
	CAPAIAN OUTPUT			28	20	24	31	22	14	23	27				
01.001.009	Tanpa Sub Output														
01.001.009.216	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	142 Rek	Rancangan	01	11	17	17	9	12	16	16	16	10	7	ın
	CAPAIAN KOMPONEN			20	14	77	28	18	11		_	15	25	19	
01.001.009.217	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	9 Rek	Rancangan Rekomendasi	-	365	1	#	1	1	-	-	ee .	0	0	0
	CAPAIAN KOMPONEN			1	9	2	9	2	6	-		10	7	10	
01.001.009.218	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakti Presiden di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	9 Rel	Rancangan Rekomendasi	1	1	1	н	п	1	1	1	1	0	0	0
	CAPAIAN KOMPONEN			**	0	-1	0	2	0	2	**	2	0	1	0

TARGET CAPAIAN RENJA K/I, TA 2019

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

3. SASARAN PROGRAM

4. KEGIATAN

5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) 6. SASARAN KEGIATAN

: O6 - Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

: 5018 - Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika : 01 - Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan

: Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Jakarta, Januari 2020

0

0

0

ч

-

Н

н

~

г

-

Ţ

-

Rancangan Rekomendasi

თ

Jumilah rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pertahanan, Keamanan, Kominfo yang

CAPAIAN IOK

disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam

01.001.03

CAPAIAN IOK

0

0

0

9 0

12

Ħ

유 10

80

9

RENCANA REALISASI BULAN ICE-

15

18

18

8

#

77

29

14

13

Rancangan SATUAN

m

H 17

TAHUN 2019

VOLUME TARGET 160 'n

9

16

16 17

16 16

12

10 18

17

12 z

Ξ

9

Rancangan Rekomendasi

142

Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan. Keamanan, Komunikasi, dan Informatika yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan

ancangan Rekomendasi kebijakan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

OUTPUT KEGIATAN/MDIKATOR OUTPUT KEGIATAN

KODE

19

25

15

11

28

14

20

0

0

7.4

-

-

Rancangan Rekomendasi

ø

Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan informatika yang

CAPAIAN IOK

disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

01.001.02

01.001.01 5018.001

Edwin, Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M., M.H. Komunikasi, dan Informatika THUS NOW

REALISAST ANGGARAN
Per Pengelola Kegiatan Per Kegiatan Output SubOutput Komponen Akun
Penode s.d. 31 Desember 2019

Berdasarkan Kurtansı Halaman : 1 dan 2

SEKRETARIAT KABINET SEKRETARIAT KABINET SEKRETARIAT KABINET DIPA NO. SP DJPA-114.01-0/AG/2019 Tgl. 12 Desember 2018 Kementran Unit Organisas Satuan Kerja DIPA No. Tgl.

THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED		Transcration .	1 0000 1 1000 100	A Annual Control of the Control of t	Con Long House of the Control of the			The state of the s
	DANIAH REALEASI	1.100,000,000	1.100.000.000	643.077.138	455.378.625	1.098.455.743	39/86	1.5M.257
03 DEPUTT POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	KIM DAN KEAMANAN	1.100.000.000	1.100.000.000	643.077.118	455.378.625	1.098,455,743	99,85	1.544.257
1	ASDEP BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNTKASI DAN INFORMATIKA	1 100,000,000	1,100,000,000	643 077, 118	455, 378, 625	1.098.455,743	28,99	154.35
06.5018 DUKUNGAN PI KEAMANAN 6	DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAEMEN KABINET DI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN KOMURIKASI, DAN INFORMATIKA	1.100,000,000	000'000'001'1	643 077 :18	455 378,625	1.048,455 /43	58'66	1,544,257
SOUTH SANDANGAN	EMANAGEMENT OF THE SAME SETTINGS OF SIDER OF THE CONTROL	1 (00),000,000	1,100,000,000	A1101011H	455 FARAGE	1558385.00		11346,017
12 SAME 1.21	CHANGLAN CONTRACTOR OF THE PROGRAMMENT							
600,100	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	1.100.000.000	1.100.000.000	643.077,118	455,378.625	1.098.455.743	58,85	1.544.257
216 Pern pern	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaran pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunasa, dan Informatika	1,026,988.000	1.062.567.000	606.130.618	455.378.625	1.061.509.243	8,8	1.057.757
S21211-RM	BELANIA BAHAN	72,200,000	37.591,000	37.585.000	0	37.585.000	86,56	9.000
522151-RIM	BELANJA JASA PROFEST	129,600,000	45.500.000	45.329.000	0	45,329,000	29,66	171,000
524111-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS BIASA	295.711.000	233.693.000	156.296.180	77,396,300	233.692.480	66'66	520
524113-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	9.450.000	13.950.000	13,070,000	D	13.070.000	69'66	880,000
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	7.800.000	14,700.000	14,700,000	0	14.700.000	100,00	0
524119-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	169.529.000	380.635.000	286.685.734	93,949,265	380.634,999	100,00	1
524219-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	342,698,000	336.498.000	52,464,704	284.033.060	336,497,764	66'66	236
21,7 Pen	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan	46,948,000	37,433,000	36.946.500	0	36,946,500	98,70	486,500
uan Liad	ızın prakarsa dən substansı rançangan peraturan perundang-undangan di bidang Pertahanan, Keamanan,							
Kon	Komunikası, dan Informatika							
521211-RM	BELANJA BAHAN	13.800.000	28.152.000	27.665.500	0	27,665,500	98,27	486.500
S24113-RM	BEBAN PERJALAWAN DINAS DALAM KOTA	2.250.000	2.250.000	2.250.000	O	2.250.000	100,001	0
524114-RM	BEBAN PERJALANAN DINAS PANCET MEETING DALAM KOTA	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	3,000.000	100,00	0
524119-RM	BEBAN PERJALAWAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	27.698.000	4.031.000	4,031,000	0	4-031.000	100,00	0
218 Pen akar dan Kon	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin danyatau dihadan oleh Presiden danyatau Wakil Presiden di bidang Pertahanan, Keumanan, Komunikasi, dan Inf	26.064.000	٥	0	0	0	00'0	٥
521211-RM	BELANJA BAHAN	000'006'9	0	0	0	0	00'0	0
524111-RM	BEBAN PERJALAMAN DINAS BIASA	14.664.000	0	0	0	0	00'0	0
410 511453	SALES OF TAXABLE SALES	4.500.000	C	-	Q		000	

FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2019

No.		Pernyataan	Checklist
I	Format	 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting satuan Organisasi/Unit Kerja LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj LKj telah menyajikan capaian kinerja satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan Telah menyajikan akuntabilitas keuangan 	 ✓ Telah menyajikan profil (hal 3) ✓ Telah sesuai sistematika (SE Bidang Adm No 4 th 2018) (hal v) ✓ Capaian kinerja (hal 27) ✓ Lampiran telah mendukung (hal 30) ✓ Terdapat upaya perbaikan (hal 61) ✓ Terdapat realisasi anggaran (hal 63)
п	Mekanisme penyusunan	 LKj satuan organisasi disusun oleh FO/penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya 	✓ Telah dikerjakan PIC asdep ✓ Data LKj telah memadai (Belum ada mekanisme) ✓ Data yang disajikan valid
	Substansi	 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat 	✓ Telah sesuai dengan PK (hal 19) ✓ Telah selaras dengan rencana strategis (hal 20) ✓ Telah selaras (hal 20) ✓ Telah sesuai (hal 23) ✓ Telah sesuai sasaran & indikator kinerja pada PK dengan IKU (hal 24) ✓ Telah memadai (hal 24) ✓ Perbandingan kerja 2 tahun (hal 59)